



**DISKOMINFO**  
KABUPATEN TANAH LAUT

# LAPORAN KINERJA Tahun 2023

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANAH LAUT**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan pada waktunya. LAPKIN tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

LAPKIN dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LAPKIN ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LAPKIN ini oleh setiap jajaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, Januari 2024

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut.**



**GENTRY YULIANTONO, SE**  
NIP. 19660708 199303 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terdiri 4 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan Kepala Bidang Komunikasi. Sedangkan Esselon IV sejumlah 4 Jabatan ( 2 Kasubbag dan 2 Kasi).

Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan upaya untuk mewujudkan Visi (Tanah Laut yang Berinteraksi) dan Misi Bupati Tanah Laut, **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Strategi pencapaian tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut secara umum menyesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 berorientasi pada sasaran Meningkatnya pemanfaatan SPBE

(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi; Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi); Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi; Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian; Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja; dan Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD. Strategi yang disusun untuk mengembangkan komunikasi dan informatika dalam rangka mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Peningkatan kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD terkait maupun perguruan tinggi dalam hal pengembangan e-government; Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam proses kerja dan layanan publik dengan sistem data terintegrasi; Meningkatkan cakupan media informasi publik; Melakukan kerjasama kemitraan dan hubungan dengan media komunikasi; Meningkatkan pengelolaan opini dan isu publik daerah; Meningkatkan layanan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatkan pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam menjaga keamanan dokumen; Menyediakan data statistik sektoral daerah; Pembangunan pusat data yang terintegrasi dengan SKPD. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan *e-Government*, yang diukur keberhasilannya melalui

Indikator Kinerja indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengacu pada Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai/indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 ini sebesar **3,12** dengan predikat penilaian **baik**. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2023 berdasarkan pada 5 program, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,15	3,12	99,05%
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9%	8,9%	100%
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%
4	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%	27%	100%
6	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	20%	20%	100%
7	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%

8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP SKPD	82 nilai	78,05 nilai	95,18%
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	100%	100%	100%

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dari Anggaran Rp. 15.282.604.284,- terealisasi sebesar Rp. 13.845.191.241,- (90,59%), dan fisik 96,56%. Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp. 562.424.000,- terealisasi 571.265.600,- (101,57%).

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
2. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana komunikasi dan informasi guna menunjang pelaksanaan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait pengembangan dan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	4
D. Cascading Kinerja	6
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	11
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	18
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	18
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	30
I. Sistematika Penyajian	33
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	35
A. Visi RPJMD	35
B. Misi RPJMD	35
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	36
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	41
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	48
1. Sasaran RPJMD	48
2. Eselon II (Kepala Dinas)	52
3. Eselon III (Sekretaris)	62
4. Eselon III (Kepala Bidang)	71
5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)	98
B. Akuntabilitas Keuangan	128
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023	128
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	131
3. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	132
BAB IV PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Strategi Peningkatan Kinerja	141

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

### **B. Maksud dan Tujuan**

LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Visi Bupati Tanah Laut “**Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, AKtual, SInergi)**” melalui pelaksanaan program/kegiatan pada Telaahan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yakni: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pelaksanaan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain untuk meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media massa tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global, meningkatkan peran pers yang bebas, membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional, memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain adalah

untuk mendorong pemberdayaan potensi masyarakat. Pemerintah punya tanggung jawab yang besar dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dan menciptakan keterbukaan informasi, kebebasan informasi dan kebebasan pers yang kondusif bagi pengembangan peran serta masyarakat dalam era globalisasi informasi. Oleh karena itu secara konsisten, segenap komponen bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut perlu turut serta mendapatkan iklim yang kondusif untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian kebebasan di bidang informasi dan komunikasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi dan Informasi yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut;
2. Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut;
3. Terwujudnya inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
4. Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
5. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar Hukum dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.

#### **D. Cascading Kinerja**

Gambaran cascading kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut diperlihatkan pada bagan 1.1 di bawah ini :

Bagan 1.1 Cascading Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut



SASARAN PROGRAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut</li> <li>2. Meningkatkan pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut</li> <li>2. Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut</li> <li>3. Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral SKPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian</li> <li>2. Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja</li> </ol>
INDIKATOR	<p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase informasi yang disebarkan</li> <li>2. Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi</li> </ol>	<p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</li> <li>2. Persentase penggunaan domain tanahloutkab.go.id</li> <li>3. Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi</li> </ol>	<p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase statistik Sektoral daerah</li> </ol>	<p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)</li> </ol>	<p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu</li> <li>2. Nilai RB SKPD</li> <li>3. Nilai SAKIP SKPD</li> </ol>

KEGIA TAN	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--------------	--	--	--	---	--	--	--	---	------------------------------------	--	--	---

INDIKATOR KEGIATAN	Persentase capaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase capaian Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut	Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--------------------	--	---	---	---	---	--	---	--	--	---	---	--

## **E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang kemudian diperbaharui pada tahun 2021 melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

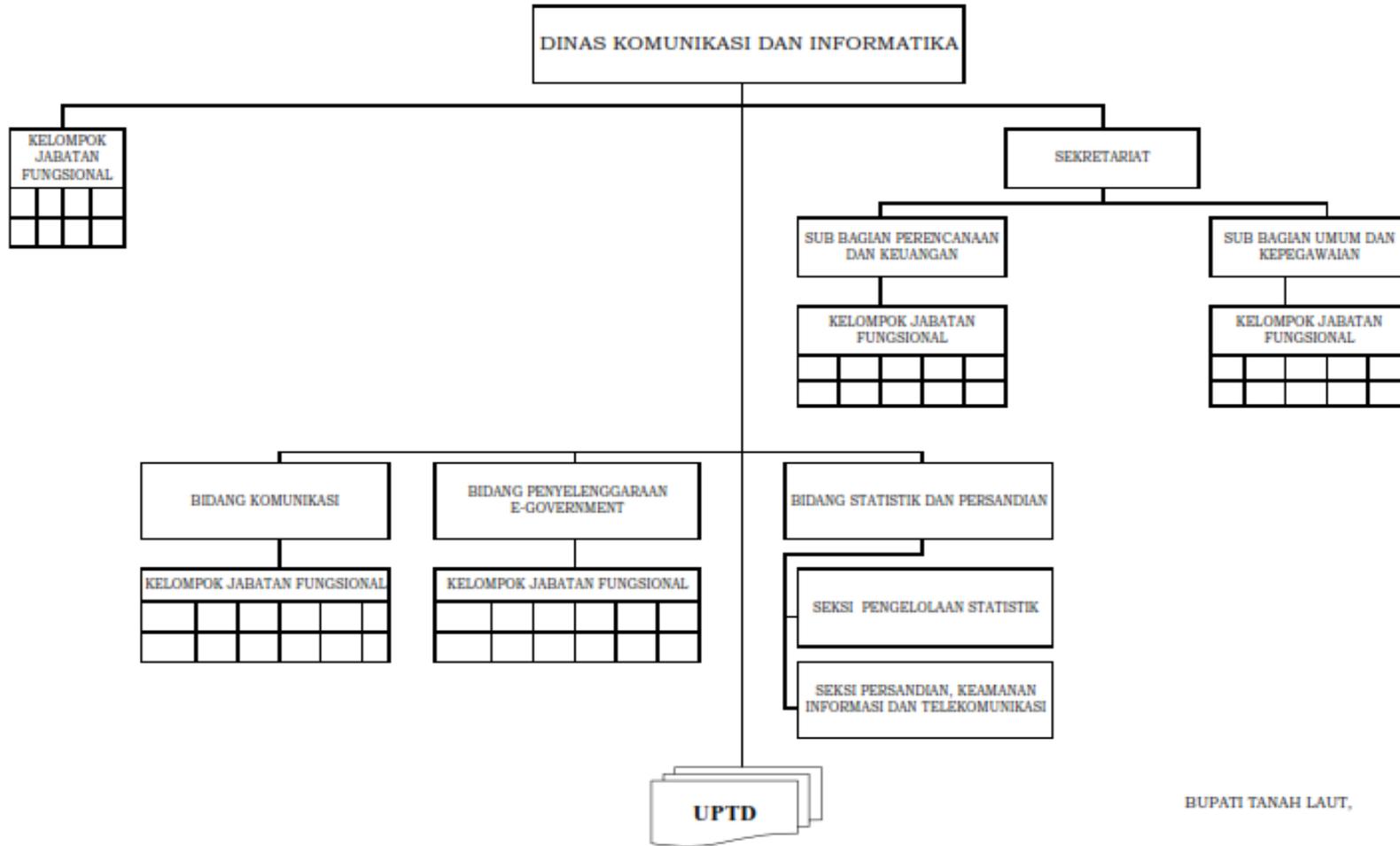
Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pembinaan UPT dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada bagan 1.2 beserta uraian tugas sebagai berikut :

Bagan 1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
  - 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
- f. Unit Pelaksana Teknis

### **Kepala Dinas**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pembinaan UPT Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Sekretariat**

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat membawahi dari:**

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

**Bidang Komunikasi**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
  - b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;

- f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Penyelenggaraan E-Government**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan E-Government.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan E-Government;
  - b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan E-Government;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan E-Government;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan E-Government;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
  - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang E-Government;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan E-Government;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Statistik dan Persandian**

(1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.

(2) Menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
- b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
- f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Statistik dan Persandian membawahi dari:**

- 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
- 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

### **Seksi Pengelolaan Statistik**

- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

### **Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.

## **F. Isu Strategis**

Isu-isu strategis terkait pengembangan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan permasalahan, sebagai berikut:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut
3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut.
4. Pengelolaan persandian dan keamanan informasi.

## **G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran**

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 19 orang tersebut, terdiri dari Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 0 orang (dijabat oleh seorang pelaksana tugas (Plt), Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 2 orang dan 1 orang pelaksana tugas kepala bidang (Plt), Kepala Seksi (Pejabat Pangawas) sebanyak 4 orang, staf pelaksana/fungsional sebanyak 11

orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas	0				0
2	Sekretaris		1			0
3	Kepala Bidang		3			3
4	Kepala Seksi			4		4
5	Staf PNS				11	11
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>19</b>

Golongan III menempati jumlah terbanyak di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebanyak 13 orang, diikuti golongan II sebanyak 4 orang, golongan IV sebanyak 2 orang serta ditambah tenaga kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas			0					0
2	Sekretaris		1						1
3	Kepala Bidang		1	2					3
4	Kasubbag/Kasi			4					4
5	Staf		1	4	4	2			11
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 3 orang memiliki pendidikan S2, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang 1 orang dan 1 orang

pejabat fungsional. Yang memiliki pendidikan S1/D4 sebanyak 10 orang, D3 sebanyak 4 orang dan SLTA sebanyak 2 orang.

Terkait dengan LAPKIN, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sudah mencukupi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun akan terus ditingkatkan guna peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel sarana dan prasarana umum sebagai berikut:

Tabel 1.3

Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG	KETERANGAN	TAHUN PENGADAAN
1	Portable Generating Set	1	Baik	Genset Radio Tuntung Pandang	2015
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	Baik	Mobil operasional Kepala Dinas dan mobil operasional Dinas dan mobil operasional Radio Tuntung Pandang FM	2019, 2014, 2014
3	Sepeda Motor	6	Cukup baik	Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas	2014

4	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	6	Baik	Berupa penangkal petir beserta perlengkapannya pendukungnya, tower jaringan ukuran sedang, plat besi/dak cor pelindung kabel	2015
5	Perkakas Standar Lain-lain	14	Baik	Harness, carabiner, tali karmantel, Bag Pack, mini katrol (pulley), figure 8	2015
6	Perkakas Khusus Lain-lain	38	Baik	Digital multimeter, LAN tester digital, bor baterai combo, harness/sabuk pengaman, Bag pack (tas peralatan), portabel iron solder, obeng set, tespen, obeng listrik, kunci inggris, kunci sock, kunci ring all pas size, Tang set, Kunci L Panjang, Crimping Tool RJ11/RJ45, pemotong kabel, Toolbox, helmet, Headlamp	2015
7	Lemari Besi	9	Baik	Lemari arsip	2017
8	Rak Besi/Metal	10	Baik	rackmount untuk penyimpan radio station, Rack Server 42/48 U, Rack Server 18/22 U, Rak besi arsip	2015
9	Filling Besi/Metal	4	Baik	Filling Kabinet Tingkat 4 (Empat)	2017
10	Brank Kas	1	Baik	-	2010
11	Kardek Besi/Metal	2	Baik	Locker 5 laci	2013
12	Papan Visuil	3	Baik	running text, Runing text mobil Radio tuntung pandang, Neon box mobil radio tuntung pandang	2014

13	Papan Nama Instansi	1	Baik	-	2018
14	Papan Pengumuman	8	Baik	untuk pemberitahuan kawasan free wifi	2018
15	Mesin Absensi	93	Baik	Mesin Absensi untuk menunjang pelaksanaan kehadiran pegawai di SKPD	2019
16	Genset	2	Baik		2015
17	Mesin Pompa Air	1	Baik	-	2015
18	Papan Nama Ruang/Jabatan	12	Baik	-	2018
19	Papan Nama Lainnya	1	Baik	Papan nama Radio Tuntung Pandang	2014
20	Meja Kayu	10	Baik	meja kerja	2013
21	Meja Rapat	5	Baik	Meja rapat	2017, 2023
22	Meja Panjang	1	Baik	Meja Jati Panjang 3m + Kursi	2015
23	Bangku Tunggu	2	Baik	Bangku tunggu	2015
24	Kursi Lipat	10	Baik	Kursi lipat pengadaan Tahun 2018	2018
25	Meja Komputer	2	Baik	-	2018
26	Sofa	2	Baik	-	2016
27	Kursi Kerja	36	Baik	Kursi kerja eselon dan staf	2017
28	Meja Kerja	8	Baik	-	2017
29	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik	-	2015
30	AC Split	12	Baik	-	2017, 2019, 2023
31	Exhause Fan	1	Baik	-	2018
32	Televisi	2	Baik	untuk di Bidang E Government	2019
33	Microphone	1	Baik	Mikropon Siaran Warna Silver	2019
34	Microphone Table Stand	6	Baik	Mikropon meja berdiri	2019
35	Tandon Air	1	Baik	-	2018
36	Tabung Pemadam Api	2	Cukup baik	-	2019
37	Mainframe	3	Baik	Server data high end, server 16 GB Ram, 2 x 1 TB	2019

38	Personal Komputer Lain-lain	4	Baik	Management Routing, wire management, Switch (Workgroup Switches, 48 10/100/1000, 2 T/SFP LAN), H/W Firewall	2015
39	P.C Unit/ Komputer PC	21	Baik	-	2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023
40	Laptop	19	Baik	-	2017, 2019, 2020, 2023
41	Personal Komputer Lain-lain	5	Baik	untuk pemetaan dan desain grafis, load balancing	2019
42	Hard Disk	4	Baik	Hardisk server	2019
43	Monitor	3	Baik	LCD Monitor	2019, 2023
44	Printer	20	baik	-	2017, 2018, 2019, 2020, 2023
45	UPS	7	Baik	UPS Rackmount non expandable, UPS/Stabilizer-Informasi, UPS 10.000 VA + Railing Kit + Battery Pack	2019
46	Stabilizer/Stavolt	3	Baik	Stabilizer / INFORMASI	2019
47	Harddisk Eksternal	4	Baik	meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual	2019
48	Memory	2	Baik	untuk meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual, SSD	2019
49	Router	67	Baik	PC Bridge, Router 16 Core CPU, Omni Router, Backup Router	2019
50	Modem	21	Baik	perlengkapan sms broadcast/gateway dan MODEM	2018

				BID.EGOV TH 2018	
51	Peralatan Jaringan Lain-lain	6	Kurang Baik	perlengkapan sms broadcast/ gateway, jaringan FO feeder, perlengkapan, dan jasa instalasinya, jaringan intranet, perlengkapan, dan instalasinya, print server	2018
52	Tiang Antena	7	Baik	Tiang Hotspot	2018
53	Radio Access Point	37	Baik	Sollar cell Hotspot, Radio point multi, Radio Point to Point (Station receive dan wds) Radio Point to Point (Station receive dan wds) Radio point to point( station receive dan wds )	2018
54	Antena	5	Kurang baik	antena omni jaringan penunjang e-governm	2015
55	Switch Hub	23	Baik	-	2017
56	Wireless Access Point	8	Baik	Wireless Station 5 Ghz (outdoor)	2017, 2023
57	Anti Petir/Ground Jaringan	1	Baik	-	2019
58	Proyektor + Attachment	1	Baik	water wall & proyektor	2015
59	Telephone Hybird	1	Kurang Baik	IP Phone	2015
60	Headphone	12	Baik	-	2015
61	Microphone/Wireless Mic	8	Baik	-	2019, 2023
62	Professional Sound System	3	Kurang Baik	Sound Sistem	2016
63	Microphone Table stand	6	Kurang Baik	-	2016
64	Handycam	1	Baik	-	2019
65	Stand Microphone	5	Cukup Baik	-	2019
66	Televisi	1	Baik	-	2019
67	Camera Electronic	3	Baik	-	2019
68	Amplifier	1	Baik	Amplifier	2019
69	Loudspeaker	2	Baik	speaker	2019

70	Handy Talky	8	Baik	-	2019
71	Handphone	5	Baik	-	2019
72	Sound System	1	Baik	-	2019
73	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	2	Baik	-	2019
74	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	3	Cukup Baik	Tabung Pemancar Radio Tuntung Pandang FM dan Exiter Pemancar Radio	2019
75	Program Input Equipment Lain-lain	1	Baik	Exiter	2019
76	CCTV	1	Baik	TEKNOLOGI DIGITAL SECURITY DI TITIK RAWAN KAMTIBMAS	2018
77	CCTV	2	Baik	cctv 8 channel	2020, 2023
78	Tabung Pemadam Api	2	Baik	-	2020
79	Stand Microphone	5	Baik	-	2020
80	Meja Siaran	3	Baik	-	2020
81	Kursi Staf	26	Baik	-	2020, 2023
82	Air Conditioner 1 PK	4	Baik	-	2020
83	Air Conditioner 1,5 PK	1	Baik	-	2020
84	Kipas Angin	2	Baik	-	2020
85	Televisi LED TV 40 inch	1	Baik	-	2020
86	Scanner	3	Baik	-	2020, 2023
87	Meja Kerja	1	Baik	-	2020
88	Kursi Kerja	1	Baik	-	2020
89	Kursi Tamu	1	Baik	-	2020
90	Layar Proyektor 120"	1	Baik	-	2020
91	Layar Proyektor 96"	1	Baik	-	2023
92	Alat pengontrol temperatur/suhu ruangan	1	Baik	-	2020
93	Drone	1	Baik	-	2021
94	Kamera Video	4	Baik	-	2021
95	Video Capture	2	Baik	-	2021
96	Tangga Teleskopik	1	Baik	-	2021
97	Bracket TV up to 65 Inch	2	Baik	-	2021
98	Alat Pemadam Api Ringan Fireball	6	Baik	-	2021
99	Alat Pemadam Api Ringan Tabung	1	Baik	-	2021

100	UPS 30 Kva (include Modular Battery Cabinet, Battery String)	1	Baik	-	2021
101	MEMORY (RAM) 8 GB DDR4	1	Baik	-	2021
102	Hardisk eksternal 2 TB	1	Baik	-	2021
103	Perangka Jaringan Lainnya	1	Baik	Cloud Core Router, Access Point SKPD, Switch Hub, Splitter 1:4 Optical Distribution Point, Splitter 1:8 Optical Distribution Point, Optical Network Termination (ONT)	2021
104	Jaringan Fiber Optik Antar SKPD	1	Baik	-	2020
105	Rackmount	4	Baik	-	2020, 2023
106	FO Toolkit	1	Baik	-	2020
107	Perangkat Video Conference	2	Baik	-	2020
108	Perangkat Keamanan Ruang NOC	1	Baik	CCTV dan Alarm	2020
109	Panel listrik ruang NOC	1	Baik	-	2020
110	Aplikasi penunjang E-Government	10	Baik	-	2020, 2023
111	Komputer Tablet	1	Baik	-	2020
112	UPS 6000 VA	1	Baik	-	2020
113	Magnetic Switch 220 V	2	Baik	-	2020
114	Peralatan Studio Video dan Film	1	Baik	-	2020
115	Alat Komunikasi Radio VHF	1	Baik	-	2020
116	UPS Standar 1200 V	1	Baik	-	2023
117	Routerboard	1	Baik	-	2023
118	Artificial Plant	2	Baik	-	2023
119	Bracket Monitor Video Wall	16	Baik	-	2023
120	Interior Command Center	1	Baik	-	2023
121	Kursi Deret Ruang Peninjau	2	Bak	-	2023
122	Kursi Rapat	6	Baik	-	2023
123	Kursi VVIP	1	Baik	-	2023
124	Meja Kendali	1	Baik	-	2023

125	Meja Operator Melengkung	1	Baik	-	2023
126	Meja Pemantau CCTV	1	Baik	-	2023
127	Televisi LED TV 65 inch	2	Baik	-	2023
128	Apar Powder	1	Baik	-	2023
129	Ceiling Speaker	4	Baik	-	2023
130	Clip On microphone	1	Baik	-	2023
131	Meja Call Centre & Pengolahan Data uk 120x60	3	Baik	-	2023
132	Microphone Chairman unit	1	Baik	-	2023
133	Microphone delegate unit	4	Baik	-	2023
134	Video Processor Board Output HDMI 4 chanel	4	Baik	-	2023
135	Volume Control Ruangan	3	Baik	-	2023
136	HDMI Extender Reciever dan Sender	30	Baik	-	2023
137	HDMI Splitter	16	Baik	-	2023
138	Kabel HDMI	30	Baik	-	2023
139	Kabel UTP	16	Baik	-	2023
140	LCD/LED Video Wall Sektor Utama dan Sekunder	14	Baik	-	2023
141	Mobile Video Conference	1	Baik	-	2023
142	Sistem Audio (channel Audio Mixer)	1	Baik	-	2023
143	Video Controller 4U Chasis 11 Slot	1	Baik	-	2023
144	Video Processor Board Input HDMI 4 chanel	1	Baik	-	2023
145	UPS 10000 VA	1	Baik	-	2023
146	PC Unit Operator dan Pengendali Command Center	7	Baik	-	2023
147	Eksternal Webcam Operator Command Center	7	Baik	-	2023
148	Headset	7	Baik	-	2023
149	LED/LCD 22 inchi Touchscreen	3	Baik	-	2023
150	LED/LCD Monitor	13	Baik	-	2023

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut maka diperlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

## **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 2.900.000,-**

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.000.000,-
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 900.000,-

### **2. Adminitasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.840.388.971,-**

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.836.888.971,-
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 3.500.000,-

### **3. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 446.977.569,-**

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 6.683.943,-
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 91.113.045,-
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 10.080.527,-
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 16.500.054,-
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp 3.600.000,-
- f) Penyediaan Bahan / Material sebesar Rp. 10.000.000,-

- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 309.000.000,-
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 24.218.182,-**
  - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 24.218.182,-
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 753.640.076,-**
  - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 191.000.000,-
  - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 562.640.076,-
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 129.450.000,-**
  - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 41.000.000,-
  - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan sebesar Rp. 72.000.000,-
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 16.450.000,-

## **II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

- 7. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.525.009.634,-**
  - a) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 100.021.919,-
  - b) Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 2.983.994.515,-
  - c) Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 440.993.200,-

## **III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**

**8. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 6.344.058.342,-**

- a) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebesar Rp. 6.344.058.342,-

**9. Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 166.000.000,-**

- a) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar Rp. 166.000.000,-

**IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

**10. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 32.276.510,-**

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebesar Rp. 32.276.510,-

**V. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

**11. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 17.685.000,-**

- a) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 17.685.000,-

**H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mendapatkan beberapa catatan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan menjadi perbaikan SAKIP ke depannya yang dirangkum dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Tindak lanjut atas LHE SAKIP SKPD Tahun 2022

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status/Progress Penyelesaian	Keterangan
1	Terhadap Perencanaan Kinerja: agar dokumen perencanaan kinerja yang telah selaras dipertahankan dan tetap direviu secara berkala sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan dan perbaikan.	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan target kinerja telah sesuai dan akan terus dilakukan reviu secara berkala melalui monitoring dan evaluasi internal atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pencapaian sasaran kinerja dalam proses pencapaian IKU dinas dan capaian kinerja per bidang setiap triwulan.	Telah dilaksanakan setiap triwulan	1 tahun
2	Terhadap Pengukuran Kinerja: 1. Agar monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang atas pencapaian kinerja sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja; 2. Agar dibuat analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dan penggunaan sumber daya yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja.	1. Monitoring dan evaluasi internal telah dilaksanakan secara berkala dan berjenjang setiap triwulannya dan akan terus dimonitoring dan dievaluasi untuk mencapai sasaran kinerja;	Monev internal dinas Triwulan 1 s.d 4 tahun 2023 telah dilaksanakan	1 tahun
		2. Pada dokumen pelaporan kinerja akan dimuat analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dan penggunaan sumber daya yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja.	Akan dimuat dalam Lapkin Tahun 2023	Awal tahun 2024

3	<p>Terhadap pelaporan kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja sehingga informasi yang disajikan akan lebih berkualitas dan menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai;</li> <li>2. Agar dalam laporan kinerja menyajikan efisiensi penggunaan anggaran dan penggunaan sumber daya yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja;</li> <li>3. Agar laporan kinerja menginfokan perubahan budaya kinerja organisasi untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.</li> </ol>	1. Telah dilakukan reviu secara berjenjang atas laporan kinerja dan akan menjadi kepedulian bagi seluruh pegawai;	Telah dilaksanakan	Juli s.d Desember
		2. Perbaiki laporan kinerja tahunan akan dimua/disajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja;	Akan dimuat dalam Lapkin Tahun 2023	Awal tahun 2024
		3. Dalam upaya perbaikan dokumen laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika akan memuat informasi atas tren perubahan budaya kinerja organisasi untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.	Akan dimuat dalam Lapkin Tahun 2023	Awal tahun 2024
4	<p>Terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal:</p> <p>Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga dapat meningkatkan</p>	Semua rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal akan ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai	Telah dilaksanakan 2023 dan terkait LKJ akan dilakukan perbaikan di awal tahun 2024	1 Tahun

	akutabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang.	hasil evaluasi yang akan datang.		
--	---	----------------------------------	--	--

## I. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2023 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - 1. Sasaran RPJMD
  - 2. Eselon II (Kepala Dinas)
  - 3. Eselon III (Sekretaris)
  - 4. Eselon III (Kepala Bidang)
  - 5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)
- B. Akuntabilitas Keuangan
  - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023
  - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
  - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

## BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kerja

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 4. Cascading/Pohon Kinerja
- 5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
- 6. Monev Renstra
- 7. Matrik Keselarasan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **Rencana Strategis (Renstra)**

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

#### **A. Visi RPJMD**

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

***“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI  
(BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”***

#### **B. Misi RPJMD**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;

2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yaitu: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

### C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1** : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang

- berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- Tujuan** : 1. Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut
- Sasaran** : 1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut  
1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi  
1.3 Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)
2. **Misi 2** : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- Tujuan** : 2. Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut
- Sasaran** : 2.1 Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi
3. **Misi 3** : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Tujuan** : 3.1 Terwujudnya tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut  
3.2 Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan  
3.3 Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut
- Sasaran** : 3.1.1 Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut  
3.2.1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)  
: 3.3.1 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian  
: 3.3.2 Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja  
: 3.4.1 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,15
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9 %
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %
4	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarkan	100 %
5	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %
6	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	20 %
7	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %
8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi	100 %
		Nilai SAKIP SKPD	82 nilai

10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	100 %
----	--	--------------------------------------	-------

Berikut diperlihatkan tabel tujuan, indikator, target, sasaran, indikator dan target 5 Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 2.2 Tujuan, indikator, target, sasaran, indikator, target 5 tahun Sesuai

Renstra

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya tata kelola SPBE di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelayanan	2,8	3.1 Meningkatkan pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
			100%	3.2 Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%
			100%	3.3 Meningkatkan penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi publik	100%	1.1 Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebar	100%	100%	100%	100%	100%
				1.2 Meningkatkan pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %	27 %	27 %	27 %	27 %

		Persentase peningkatan SKPD terhadap keamanan informasi	100 %	1.3 Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	2,4%	50%	20%	20%	7,6%
3.	Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut	Persentase inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	2.1 Meningkatnya fasilitas layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %	100 %	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Persentase tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan baik	100%	3.4 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase terlaksananya pemenuhan tata kelola pemerintahan di SKPD	100%	3.5 Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD	-	80 nilai	82 nilai	84 nilai	86 nilai
					Nilai SAKIP SKPD	78 nilai	79 nilai	80 nilai	81 nilai	82 nilai
5.	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut	Persentase data sektoral SKPD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	3.6 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	80%	100%	100%

Pada tahun 2023 telah dilakukan perubahan target kinerja sehingga terjadi perbedaan antara target yang ada di Renstra dengan target pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika terutama pada indikator kinerja utama dinas yang disebabkan adanya indikator yang terealisasi pada tahun 2022 telah melebihi besaran target pada tahun 2023 sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian target kinerja pada tahun 2023. Berikut tabel target kinerja yang mengalami perubahan sesuai dengan Renja Tahun 2023

Tabel 2.3 Perubahan indikator dan target kinerja tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target pada Renstra	Perubahan Target pada Renja
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,8	3,15
	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	7,6%	20%
	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi	86 nilai	100%

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran strategis adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	1 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Hasil Penilaian SPBE dari Menpan RB	Dinas Kominfo

#### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 yang telah disepakati baik oleh Pejabat Eselon II,

Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut

:

**Perjanjian/Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2023  
(Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut)**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,15

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.197.574.798,-
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	3.525.009.634,-
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	6.510.058.342,-
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	32.276.510,-
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	17.685.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp	<b>15.282.604.284,-</b>

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi utama dan kepegawaian	1. Persentase tata kelola administrasi utama dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %
2.	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	2. Persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi	100 %
		3. Nilai SAKIP SPKD	82 nilai

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.197.574.798,-
<b>Jumlah</b>		Rp	5.197.574.798,-

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	1. Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah	100 %
2.	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	2. Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100.021.919,-
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.983.994.515,-
			Pelayanan Informasi Publik	440.993.200,-
<b>Jumlah</b>				<b>3.525.009.634,-</b>

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	1. Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9 %
2.	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	2. Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %
3.	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	3. Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.344.058.342,-
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	166.000.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>6.510.058.342,-</b>

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun  
2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	1. Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	20 %
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	2. Persentase statistik sektoral daerah	100 %

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	32.276.510,-
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.685.000,-
Jumlah				49.961.510,-

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan pemenuhan dokumen laporan reformasi birokrasi	1. Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi	65 Berkas
		2. Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang
		3. Jumlah laporan pengelolaan aset daerah	2 laporan
		4. Jumlah laporan tematik pelaksanaan reformasi birokrasi	4 dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.683.943,-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.113.045,-
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.080.527,-
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	16.500.054,-

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,-
			Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.000.000,-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.218.182,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.000.000,-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.640.076,-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000,-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	72.000.000,-
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.450.000,-
		<b>Jumlah</b>		<b>1.354.285.827,-</b>

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	1. Jumlah dokumen perencanaan dinas yang tersusun. 2. Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun. 3. Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun.	2 dokumen 4 dokumen 1 dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.836.888.971,-
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.500.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>3.843.288.971,-</b>

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian Indikator pada Aplikasi Satu Data Tanah Laut	1. Jumlah Aplikasi Satu Data yang memadai	1 aplikasi
		2. Jumlah cetak dokumen statistik sektoral daerah	1 buku
		3. Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian Indikator/Elemen Aplikasi Satu Data Tanah Laut	40 orang

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun  
2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	10 SKPD
		2. Jumlah aplikasi Sistem (web service API) tandatangan digital terpusat	1 Aplikasi

**E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut memiliki instrument pendukung capaian kinerja diantaranya:

1. Jaringan Intra antar SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
2. Akses Internet terpadu Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
3. Ruang *Network Operation Center* (NOC);
4. Gedung Command Center Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
5. Akses komunikasi dengan 1 unit tower pemancar radio;
6. Portal Website Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
8. Studio LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut;
9. Website layanan Informasi dan Data Tanah Laut.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan mekanisme prosedur pelayanan, di antaranya :

- a. Penyiaran iklan layanan masyarakat
- b. Peliputan dan penyiaran
- c. Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi)
- d. Pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi
- e. Pengendalian hak akses data
- f. Pemeliharaan dan akses data center
- g. Layanan lapor.go.id Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- h. Manajemen dan akses data jaringan (*network*)
- i. Pembuatan domain *website* resmi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Desa dan organisasi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- j. *Co-Location* / Penempatan server dan hosting aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- k. *Back-up* dan *restore database server* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- l. *Update website*
- m. Layanan data sektoral
- n. Tata kelola berita sandi

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

## **A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target sasaran strategis RPJMD dan perjanjian kinerja tahun 2023. Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut diukur dengan membandingkan realisasi capaian kinerja terhadap target untuk setiap indikator sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana hasil proses penyelarasan cascading kinerja oleh Tim Sakip. Regulasi kinerja dilakukan pada setiap pimpinan, mulai dari Eselon II (Kepala), Eselon III (Sekertaris dan Kepala Bidang) dan Eselon IV (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi).

Dalam penyusunan penilaian kinerja, perhitungannya persentase pencapaian secara umum, menggunakan rumus pembilang (target) dibagi dengan penyebut (realisasi) dikali 100%.

### **1. Sasaran RPJMD**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra yang telah dibuat untuk tahun 2018-2023 telah menetapkan beberapa sasaran strategis. LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun anggaran 2023 adalah Laporan Kinerja Dinas yang merupakan tahun ke ketiga dari pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan keadaan, Renstra dibuat untuk setiap sasaran dapat lebih dari satu indikator kinerja sasaran dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan indikator kinerja yang akan dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 sesuai sasaran strategis yang akan diketahui keberadaannya.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan kategori pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengelompokan Capaian Kinerja

<b>Urutan</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
I	> 90 %	Sangat Memuaskan
II	81% - 90%	Memuaskan
III	71 % - 80 %	Sangat Baik
IV	61 % - 70 %	Baik
V	51 % - 60 %	Cukup
VI	31 % - 50 %	Kurang
VII	0 - 30 %	Sangat Kurang

Berikut diperlihatkan tabel realisasi capaian Sasaran Strategis

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KET
						Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,21	2,75	3,11	3,15	3,12	99,05 %	Kategori Baik
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	17,8 %	22,5 %	10 %	8,9 %	8,9 %	100 %	
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarkan	118,93 %	97,33 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %	27 %	27 %	27 %	27 %	100 %	
6	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	2,4 %	2,4 %	22,5 %	7,6 %	7,6 %	100 %	
7	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	103 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD	-	84,05 nilai	90,11 nilai	86 nilai	-	-	Tahun 2023 tidak ada penilaian RB SKPD
		Nilai SAKIP SKPD	72,58 nilai	77,85 nilai	76,8 nilai	82 nilai	78,05 nilai	95,18 %	Kategori BB
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase statistik sektoral daerah	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN</b>							99,42 %	<b>Kategori Sangat Memuaskan</b>

Hasil perhitungan persentase rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 adalah **99,42 %** dengan kategori capaian **Sangat Memuaskan**. Meskipun demikian, capaian yang diperoleh pada tahun ini mendapat kategori sangat memuaskan namun harus tetap selalu dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## 2. Eselon II (Kepala Dinas)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) hanya terdiri dari 1 (satu) kinerja utama, yaitu meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut dengan indikator kinerja utama Indeks SPBE, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,15	3,12	2,8

- Uraian dan Analisa Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan tabel 3.1 mengenai target Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, maka dapat dibuat tabel 3.2 mengenai Capaian Indikator Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021		2022		2023		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE	3,00	2,75	2,75	3,11	3,15	3,12	Indeks

Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) hanya terdiri dari 1 (satu) kinerja utama, yaitu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TAHUN 2023		
		2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,21	2,75	3,11	3,15	3,12	99,05 %

Tabel 3.6 Hasil Evaluasi SPBE tahun 2023

**Hasil Evaluasi SPBE 2023**

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2023
Tahun	: 2023
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2023
<b>Pemerintah Kab. Tanah Laut</b>	
	Pemerintah Kabupaten
K/L/D	: Tanah Laut
<b>Indeks SPBE</b>	: <b>3,12</b>
<b>Predikat SPBE</b>	: <b>Baik</b>

**Nilai Indeks**

<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	: 3,8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 3,8
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	: 3,1
Perencanaan Strategis SPBE	: 3,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 3,4
Penyelenggara SPBE	: 3
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	: 1,32
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,63
Audit TIK	: 1
<b>Domain Layanan SPBE</b>	: 3,57
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,3
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 3,83

**Rekap Tingkat Kematangan**

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4

10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3

39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, diperoleh nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan indeks 3,12 (kategori Baik). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih memperoleh predikat baik. Perolehan nilai tersebut jika dibandingkan dengan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berada di urutan kelima dengan urutan indeks SPBE tertinggi Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Meskipun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berada pada kelima, namun ada kenaikan capaian prestasi dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2023, nilai perolehan indeks SPBE 3,12 sedang tahun 2022 dengan nilai 3,11 yang artinya ada kenaikan sebesar 0,01.

Tabel 3.7 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan  
Tahun 2023

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2,69	Baik
2	Pemerintah Kab. Banjar	2,87	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,12	Baik
4	Pemerintah Kab. Tapin	3,09	Baik
5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	3,51	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2,69	Baik
7	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,59	Cukup
8	Pemerintah Kab. Tabalong	3,21	Baik
9	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,28	Cukup
10	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	2,18	Cukup
11	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,17	Baik
12	Pemerintah Kab. Balangan	2,69	Baik
13	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,00	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,68	Baik

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Dasar hukum SPBE adalah Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan suatu sistem untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Hasil evaluasi SPBE Tahun 2023 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dikoordinatori oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government,

yang pelaksanaannya dianggarkan melalui program pengelolaan aplikasi informatika; kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan Kegiatan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Seluruh SKPD dan stakeholder terkait dilibatkan dalam upaya peningkatan capaian nilai SPBE di tahun 2023.

Perolehan nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 adalah sebesar 3,12 yang berarti capaian ini hampir mendekati nilai target yang ditetapkan yakni sebesar 3,15, dengan persentase realisasi mencapai 99,05%. Nilai indeks 3,12 masuk dalam predikat baik (2,6–3,5). Tabel berikut memperlihatkan kategori nilai SPBE.

Tabel 3.8 Kategori SPBE

NO	NILAI SPBE	PRIDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – <4,2	Sangat Baik
3	2,6 – <3,5	Baik
4	1,8 – <2,6	Cukup

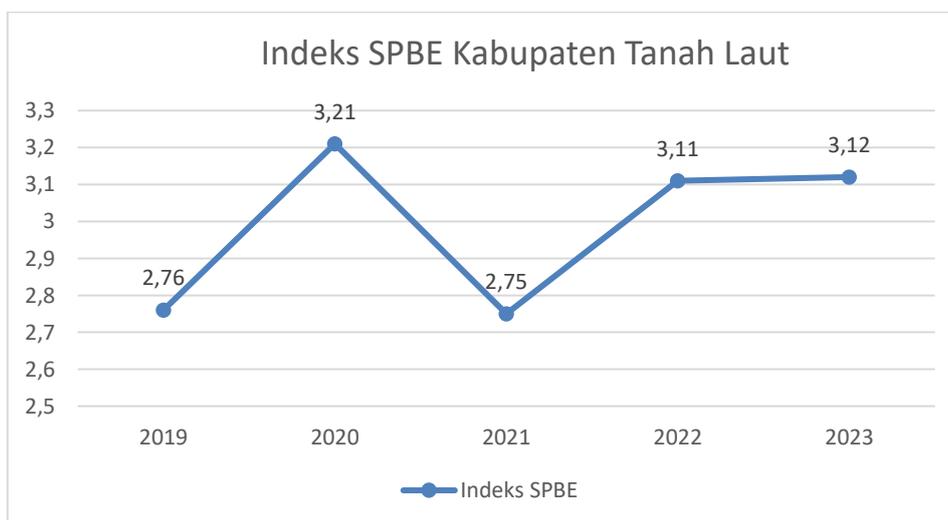
Pada Tahun 2023 penilaian SPBE didasarkan atas domain dan aspek penilaian, yang dirincikan sebagai tabel berikut:

Tabel 3.9 Domain dan Aspek Penilaian

No	DOMAIN	ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	Kebijakan SPBE	- Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
2	Tata Kelola SPBE	- Perencanaan Strategis SPBE	10%
		- Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%

		- Penyelenggara SPBE	5%
3	Manajemen SPBE	- Penerapan Manajemen SPBE	12%
		- Audit TIK	4,5%
4	Layanan SPBE	- Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
		- Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait



Indeks SPBE tahun 2023 adalah 3,12 meningkat sebesar 0,01 dari Indeks SPBE tahun 2022 dengan nilai 3,11, sedang tahun 2021 dengan nilai 2,75, pada tahun 2020 adalah 3,21 dan tahun 2019 adalah 2.76 sedangkan pada awal penilaian tahun 2018 adalah 1,42, artinya indeks SPBE telah mengalami peningkatan atau semakin baik per tahunnya. Peningkatan tersebut cukup signifikan dari tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2022 nilai SPBE kembali naik dari tahun sebelumnya (tahun 2021) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan nilai namun masih dalam kategori baik, penurunan nilai disebabkan bertambahnya indikator penilaian SPBE

dari 35 indikator menjadi 47 indikator penilaian. Nilai SPBE yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 3,12 ini jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yakni sebesar 2,8 maka nilai yang diperoleh telah melebihi target sebesar 0,32 atau capaian dalam persen sebesar 111,43%, yang artinya telah tercapai sesuai target akhir Renstra. Nilai yang diperoleh tahun ini akan lebih ditingkatkan lagi untuk penilaian indeks SPBE di tahun ke depannya.

Hasil perolehan indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 sebesar 3,12 jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE nasional tahun 2023 yakni sebesar 2,79, maka capaian Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut telah melebihi capaian indeks SPBE nasional.

Dari evaluasi penilaian SPBE ini, seluruh pimpinan dan penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diinstruksikan agar meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan nilai 3,12 bila dibandingkan dengan Indeks SPBE Tahun 2022 dengan Nilai 3,11 mengalami kenaikan sebesar 0,01. Meskipun peningkatannya kecil, peningkatan nilai tersebut diupayakan dalam rangka mempertahankan nilai SPBE yang diperoleh tahun sebelumnya dan menambah pemenuhan beberapa indikator penilaian, namun demikian meskipun dengan perolehan nilai 3,12, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih memperoleh predikat baik yang merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi seluruh unit-unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan SPBE. Berbagai upaya yang dilakukan dengan

membentuk Tim Evaluasi Internal Penilaian Mandiri SPBE di Kabupaten Tanah Laut, menyusun aktualisasi pelaksanaan SPBE, menentukan target indikator untuk dipenuhi, menyusun rencana aksi dan tindak lanjut sosialisasi, melakukan kegiatan teknis penunjang SPBE seperti integrasi berbagai aplikasi, penyediaan/fasilitasi sarana/prasarana komunikasi dan informasi, peningkatan layanan publik, peningkatan SDM aparatur, serta pemantapan dalam pelaksanaan Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Hal yang paling penting tercapainya target dan peningkatan SPBE adalah komitmen pimpinan (Bupati) yang sangat tinggi, sehingga memacu SKPD lain untuk lebih serius dan aktif mengimplementasikan SPBE. Akhirnya koordinasi dan kerja sama dapat terjalin dengan baik antar SKPD.

Selanjutnya untuk dapat lebih meningkatkan SPBE di tahun mendatang, beberapa hal rekomendasi di bawah ini agar dapat dilakukan, yaitu: perlunya peningkatan aplikasi-aplikasi Layanan Publik menuju Integrasi Layanan antar SKPD dan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; perlunya proses sinergi baik dari Tim Koordinasi SPBE dalam pelaksanaan SPBE; dan perlunya optimalisasi penerapan audit TIK di Kabupaten Tanah Laut.

#### d. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 telah terlaksana 100% secara keseluruhan pada kinerja fisik dengan capaian penggunaan anggaran sebesar Rp 13.845.191.241,- dari pagu anggaran sebesar Rp 15.282.604.284,- dengan persentase capaian 90,59 %, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.437.413.043,- atau 9,41 %.

#### e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 sebanyak 20 orang PNS, terdiri dari Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang yang tugasnya dilaksanakan oleh pelaksana tugas (Plt), Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Pejabat Pangawas) sebanyak 4 orang, staf pelaksana sebanyak 11 orang. Selain itu dalam pelaksanaan tugas teknis lainnya juga dibantu oleh tenaga kontrak/pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 23 orang.

f. Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada muncul dalam pencapaian indikator Indeks SPBE tahun 2023, diantaranya:

1. Belum optimalnya Manajemen SPBE;
2. Belum optimalnya penerapan Audit TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi); dan
3. Belum optimalnya Layanan Pengawasan Internal Pemerintah.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- a. Mengupayakan sinerginya Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanah Laut melalui pembentukan tim koordinasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Mengupayakan peningkatan SDM yang memiliki kompetensi untuk mengelola Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. Mengupayakan pengoptimalan penerapan Audit TIK ( Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan Informasi) di Daerah;

- d. Mengupayakan pembetulan tim audit SPBE yang dikoordinatori oleh tim audit TIK Inspektorat Kabupaten sesuai dengan hasil *assessment* terhadap pelaksanaan SPBE Kabupaten Tanah Laut tahun 2021; dan
- e. Melakukan penyesuaian atas aplikasi layanan yang masih belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

### 3. Eselon III (Sekretaris)

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Sekretaris tahun 2023.

Tabel 3.10 Hasil capaian realisasi sasaran Sekretaris

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	3.3 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	3.4 Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP SKPD	82 nilai	78,05 nilai	95,18 %	82 nilai	95,18 %
Rata-Rata Capaian					98,39 %		

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TAHUN 2023		
		2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi	-	84,05 nilai	90,11 nilai	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP SKPD	72,58 nilai	77,85 nilai	76,84 nilai	82 nilai	78,05 nilai	95,18%
Rata-rata Capaian							98,39%

g. *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat telah terealisasi 98,39%. Dari 3 indikator kinerja, indikator persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu telah tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka telah tercapai 100% sesuai dengan target. Untuk indikator nilai RB (Reformasi Birokrasi), pada tahun 2023 dilakukan perubahan penilaian secara tematik sehingga tidak diperoleh nilai Reformasi Birokrasi SKPD, namun tetap pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik tetap dilaksanakan. Dalam pengukuran capaian persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi telah terpenuhi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan isian per tema sehingga dapat diperoleh capaian persentase 100%. Sedangkan di tahun 2022 penilaian RB Dinas Komunikasi dan Informatika telah tercapai nilai 90,11 yang jika dibandingkan dengan target nilai 84, maka diperoleh persentase capaian 107,27%. Untuk indikator ketiga yakni nilai SAKIP SKPD hanya tercapai dengan nilai 78,05 dari target tahun 2023 nilai 82 dengan persentase capaian 95,18%, yang disebabkan masih banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka masih kurang 3,95 yang artinya proses pelaksanaan SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut masih harus ditingkatkan kembali untuk ke depannya.

. Dari pencapaian kinerja ini telah diperoleh tren positif atas perubahan budaya kinerja organisasi di mana seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah berkomitmen dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang baik. Tren positif budaya kinerja yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2023 diantaranya:

1. Capaian kinerja per indikator yang meningkat setiap tahunnya;
2. Penilaian capaian kinerja organisasi pada dokumen evaluasi kinerja pegawai dengan predikat baik; serta
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh penghargaan sebagai Perangkat Daerah terbaik ke-2 pada penilaian kinerja SKPD di tahun 2023 Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.



#### h. *Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2023 dengan tahun 2022 yang terdiri dari indikator persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu telah tercapai 100% pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 realisasinya juga tercapai 100%. Indikator nilai RB SKPD tahun 2023 tidak ada penilaian. Disebabkan adanya perubahan penilaian indikator Reformasi Birokrasi menjadi

penilaian tematik Reformasi Birokrasi. Sehingga dilakukan perubahan indikator menjadi Persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi dengan capaiannya telah tercapai 100%. Adapun nilai RB SKPD terakhir di tahun 2022 dengan nilai 90,11 kategori sangat baik dari target nilai sebesar 84 dengan persentase capaian 107,27%, sedang nilai SAKIP SKPD juga telah terealisasi dengan nilai 78,05 dari target nilai 82 sehingga persentase tercapaiannya adalah 95,18%. Jika dibandingkan dengan perolehan nilai SAKIP tahun 2023 atas penilaian tahun 2023 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berada di urutan ke-13 dengan nilai 78,05 (predikat BB).

Tabel 3.12 Rekap nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 atas penilaian kinerja Tahun 2022

NO	NAMA SKPD	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI	PREDIKAT
1	Setda	24,60	24,60	12,30	20,50	82	A
2	Capil	27,00	24,00	10,80	20,00	81,8	A
3	Disnaker (Utama dan Pendukung)	24,60	24,60	11,85	20,50	81,55	A
4	Dinkes	24,60	26,10	11,55	19,25	81,5	A
5	Inspektorat	25,50	24,00	12,00	20,00	81,5	A
6	BPKAD	24,60	24,60	12,30	20,00	81,2	A
7	DPMPTSP	24,00	24,00	12,00	20,00	80	BB
8	Dispar	23,70	25,50	11,40	19,25	79,85	BB
9	Disdik (Utama dan Pendukung)	24,60	24,00	12,00	19,25	79,85	BB
10	Setwan	24,60	23,10	11,10	20,50	79,3	BB
11	Distanhorbun	24,00	24,00	11,25	20,00	79,25	BB
12	Bapenda	24,00	24,00	12,00	19,25	79,25	BB
13	Diskominfo	24,60	23,10	11,85	19,25	78,05	BB
14	BKPSDM	22,20	22,20	10,95	22,50	77,85	BB
15	Dispora	24,00	22,50	11,25	20,00	77,75	BB

i. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- **Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu**

Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 telah mencapai 100% dari target yang ada yaitu sebanyak 65 berkas yang terdiri atas 39 berkas urusan umum dan 26 berkas urusan kepegawaian. Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian. Strategi kedepannya ialah penataan dan pengelolaan sistem persuratan dinas dan juga perlu peningkatan SDM pegawai karena terus berkembangnya kebutuhan akan sistem kepegawaian dari pengelolaan absensi dan pengelolaan umum, aset dan lain-lain.

- **Persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi**

Indikator Persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi ini diukur melalui perhitungan jumlah terpenuhinya dokumen-dokumen tematik Reformasi Birokrasi Kabupaten dibagi jumlah tematik dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dipenuhi. Capaiannya telah tercapai 100% dengan terpenuhinya 4 dokumen dari 4 dokumen tematik yang harus dipenuhi yakni dokumen pada tema pengentasan kemiskinan, tema peningkatan investasi, tema digitalisasi administrasi pemerintahan, dan tema pengendalian inflasi. Karena di tahun 2023 terjadi perubahan format penilaian menjadi penilaian tematik sehingga indikator nilai RB SKPD tidak dapat diperoleh. Sebagai perbandingan perolehan nilai RB SKPD tahun 2022 hasil evaluasi dari Tim evaluasi Inspektorat diperoleh nilai 90,11 dari target nilai 84. Hasil penilaian terhadap Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 menunjukkan berada pada nilai 32,71 (**90,11**), kategori Sangat Baik.

Dari hasil Pelaksanaan PMPRB Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Laut tahun 2023 sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat diperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 3.13 capaian nilai reformasi birokrasi tahun 2022

Nomor	Komponen/Sub Komponen	Hasil Penilaian	
		Nilai	%
<b>A</b>	<b>PEMENUHAN (14,60)</b>	<b>12,74</b>	<b>87,26</b>
<b>B</b>	<b>REFORM (21,70)</b>	<b>19,97</b>	<b>92,03</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>32,71</b>	<b>90,11</b>

Rencana tindak lanjut disusun setelah diperoleh nilai akhir. Rencana tindak lanjut tersebut menjadi komitmen manajemen organisasi sebagai penanggungjawab tematik reformasi birokrasi untuk menjamin perbaikan reformasi birokrasi di lingkungan SKPD guna mendukung Pelaksanaan Reformasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik di periode berikutnya.

**- Nilai SAKIP SKPD**

Indikator ini diukur oleh Tim Evaluator Nilai SAKIP SKPD tahun 2022 yang dievaluasi di tahun 2023 hasil evaluasi dari Tim evaluasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh nilai 76,84 (kategori BB) dari target nilai yang ada 82 dengan persentase capaian 95,18%. Dilihat dari perbandingan tahun sebelumnya memang terjadi penurunan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai sebesar 76,84 dengan kategori BB (sangat Baik), akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya

efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Nilai sebagai mana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

Diperoleh nilai sebesar 24,60 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **A (memuaskan)**.

b. Pengukuran kinerja

Diperoleh nilai sebesar 23,10 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **BB (sangat baik)**.

c. Pelaporan kinerja

Diperoleh nilai sebesar 11,10 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 15%) dengan kategori **BB (sangat baik)**.

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Diperoleh nilai sebesar 19,25 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 25%) dengan kategori **BB (sangat baik)**.

Dari hasil evaluasi direkomendasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Agar dokumen perencanaan kinerja yang telah selaras dipertahankan dan tetap direviu secara berkala sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan dan perbaikan;

b. Pengukuran Kinerja

1. Agar melakukan monitoring secara berkala dan berjenjang atas pencapaian kinerja sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja;

2. Agar dibuat analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dan penggunaan sumber daya yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja;

c. Pelaporan Kinerja

1. Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja sehingga informasi yang disajikan akan lebih berkualitas dan menjadi perhatian Pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai;
  2. Agar dalam laporan kinerja menyajikan efisiensi penggunaan anggaran dan penggunaan sumber daya dikaitkan dengan pencapaian kinerja;
  3. Agar laporan kinerja menginfokan perubahan budaya kinerja organisasi untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang.

j. *Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja SKPD telah memakai aplikasi nasional yakni SIPD dan aplikasi daerah e-monev.
2. Pengelolaan administrasi keuangan SKPD telah memakai sistem transaksi non tunai atau melalui Internet Banking Bisnis (IBB).
3. Pengelolaan administrasi umum SKPD terkait surat-menyurat telah menggunakan aplikasi SRIKANDI.
4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan telah dikelola dengan baik secara terjadwal.
5. Pencatatan dan pemeliharaan barang milik daerah telah dilaksanakan secara rutin secara berkala.
6. Pembinaan kepegawaian telah dilakukan melalui aplikasi SIMFONI.
7. Pelaksanaan monitoring kinerja individu secara berjenjang telah dilakukan melalui penggunaan aplikasi e-kinerja.

k. *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.520.220.962,- dari pagu program Rp 5.197.574.798,- dengan persentase capaian 86,97 %, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 677.353.836,-.

*l. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 sebanyak 8 orang PNS yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dan 4 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 6 orang tenaga kontrak (PTT). Keberhasilan capaian program pada Sekretariat didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian.
- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada program sekretariat.
- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di sekretariat yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.
- Adanya gedung baru yang representatif sangat mendukung dalam kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai Dinas Kominfo.

*m. Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran program untuk sekretariat Dinas Kominfo sebagian besar ditargetkan pada awal triwulan I sampai dengan triwulan II karena merupakan Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

- Rencana aksi kinerja untuk sekretariat Dinas Kominfo juga sebagian besar ditargetkan di awal triwulan I dan II menyesuaikan dengan rencana aksi anggaran program.

n. *Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Sekretariat, diantaranya:

- Kurangnya SDM personil yang ada pada Sekretariat Dinas Kominfo.
- Belum optimalnya monitoring program kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan laporan kinerja.
- Kurangnya data dukung administratif atau dokumentasi program kegiatan yang dilaksanakan sehingga cukup menghambat dalam penyusunan laporan akhir.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan atau diklat terkait.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala per bulan/triwulan.
- Melakukan pengumpulan data dukung secara intensif sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan akhir tahun.
- Mengupayakan peningkatan layanan melalui media informasi maupun sarana prasarana yang dimiliki kepada SKPD Lingkup Pemerintah Tanah Laut dan masyarakat umum.

#### **4. Eselon III (Kepala Bidang)**

##### **4.1 Kepala Bidang Komunikasi**

Tabel 3.14 Hasil capaian realisasi sasaran Kepala Bidang Komunikasi Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	100%	100%	100%	100%	100%
2	1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%	27%	100%	100%	108%
Rata-Rata Capaian					100%		

Indikator persentase informasi yang disebarakan ini diukur dengan membagikan jumlah informasi yang telah disebarakan dengan seluruh jumlah informasi yang telah dihimpun, maka didapatkan capaian realisasi telah tercapai 100% sesuai dengan target tahun 2023. Perbandingan indicator ini dengan capaian akhir Renstra telah tercapai 100%. Sedang untuk indikator Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) telah tercapai 27 % sesuai dengan target indikator yang ditetapkan tahun 2023, sedangkan untuk perbandingan dengan capaian akhir Renstra maka pada indikator KIM dihitung dengan mengakumulasikan capaian KIM pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sehingga diperoleh akumulasi capaian KIM sebesar 108% dari 100% target akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TAHUN 2023		
		2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase informasi yang disebarakan	118,93 %	97,33%	100%	100%	100%	100%

2.	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%	27%	27%	27%	27%	100%
						Rata-rata Capaian	100%

*a) Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata Capaian Kinerja bidang pengelolaan komunikasi adalah 100% dari 2 indikator kinerja, capaian indikator persentase informasi yang disebarakan pada tahun 2023 telah tercapai 100% yang sebelumnya juga tercapai 100% dari target 100% tahun 2022, dan indikator lainnya juga telah tercapai 27% dari target tahun 2023 (27%) sehingga pencapaiannya adalah 100%. Persentase informasi yang disebarakan pada tahun 2023 sebesar 100% yang jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yakni 100%, maka kinerjanya telah tercapai sesuai target akhir. Sedang pada persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi juga telah tercapai 100% sesuai dengan target akhir Renstra.

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2023 dengan tahun 2022 yang terdiri dari indikator persentase informasi yang telah disebarakan telah tercapai 100% sesuai target pada tahun 2023 sedang pada tahun 2022 capaian 100% dari target 100%. Sedangkan pada indikator Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi juga telah terealisasi 27% dengan target 27% sehingga tercapai 100%.

*c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**- Persentase Informasi yang Disebarakan**

Persentase informasi yang disebarakan oleh Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tanah Laut di tahun 2023 dicapai angka 100% dari target. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah informasi yang disebarakan sebanyak 904 data/informasi dibagi seluruh data informasi yang telah dihimpun sebanyak 904 data/informasi target dalam setahun pelaksanaan kegiatan. Capaian 904 data/informasi tersebut terdiri atas Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui website Tanah Laut dan radio Tuntung Pandang FM sebanyak 777 informasi dan Jumlah data/informasi publik melalui website PPID Kabupaten Tanah Laut sebanyak 100 informasi dan melalui youtube resmi pemerintah daerah sebanyak 27 informasi. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran informasi tersebut selain melalui website Tanah Laut dan PPID Tanah Laut juga disebarakan melalui media lainnya seperti Radio Tuntung Pandang FM, media cetak dan media sosial serta melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dalam pengelolaan informasi, yang semuanya telah dilaksanakan pada tahun berkenaan, namun dalam hal penyebaran informasi tersebut harus dilakukan melalui proses analisa dan identifikasi serta klasifikasi atas data/informasi yang akan disebarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terlebih dahulu berdasarkan ketentuan pada layanan informasi publik, dengan tujuan menjaga kebenaran dan akurasi data/informasi tersebut. Seluruh pencapaian atas target indikator ini dapat tercapai atas hasil kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung terlaksananya Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.

- **Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi**

Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi telah diperoleh realisasi 27 % sesuai dengan

target tahun 2023 sehingga persentase capaiannya 100%. Persentase capaian KIM ini dihitung dari jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibentuk dan dibina pada tahun 2023 yakni sebanyak 3 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibagi 11 kecamatan dikali 100% sehingga diperoleh 27%. Capaian tersebut jika dibagi dengan target pada tahun 2023 sebesar 27 % maka target telah tercapai 100%. Adapun KIM yang aktif memanfaatkan teknologi pada tahun 2023 yaitu KIM Desa Sungai Rasau, KIM Desa Banyu Irang, dan KIM Desa Martadah Baru. Pada tahun 2022 pun ini juga diperoleh capaian 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi yakni masih adanya wilayah yang tidak memiliki jaringan internet yang baik atau wilayahnya tidak terjangkau internet sehingga terkendala saat mempublikasikan informasi melalui media website ataupun media sosial lainnya. Untuk selanjutnya Pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ini terus dilakukan pembenahan dan peningkatan dalam bentuk desa informatik dengan menjalin koordinasi dengan Kepala Desa dan Camat serta masyarakat untuk turut mendukung program Kota ditata Desa dibina.

Gambar koordinasi dengan desa terkait rencana pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)



Gambar Piagam penghargaan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut kepada KIM Desa Sungai Rasau yang telah menjadi perwakilan Lomba KIM di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan



*d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) melalui website

ppid.tanahlautkb.go.id dimana Diskominfo Tanah Laut sebagai PPID utama yang mengkoordinir PPID Pembantu pada setiap badan publik (satuan kerja) dilingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut

2. Melakukan monitoring berkala setiap triwulan terhadap informasi yang telah dipublikasikan melalui website ppid.tanahlautkab.go.id
3. Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media radio Tuntung Pandang FM dengan program Siaran Info Tala, Tanah Laut Menyapa dan Ruang Inspirasi dengan menghadirkan narasumber dari instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun instansi vertikal dan narasumber inspiratif.
4. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui pelatihan pembuatan media publikasi berupa blogspot, dan pelatihan tata cara penulisan berita dan pengambilan foto untuk konten publikasi serta penyebarluasan informasi melalui WAG KIM.
5. Penyebarluasan informasi melalui media sosial fanpage Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, portal website Tanah Laut di alamat website resmi pemerintah kabupaten tanah laut [www.tanahlautkab.go.id](http://www.tanahlautkab.go.id), media sosial instagram, facebook, youtube serta website tpfm.tanahlautkab.go.id.
6. Pro-Aktif dalam penyebarluaskan informasi valid dan cegah isu *hoax* virus corona melalui media pemerintah daerah.
7. Pengelolaan aplikasi e-lapor Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
8. Melakukan rapat koordinasi setiap tahun anggaran dengan seluruh PPID Pembantu dan Pejabat Penghubung LAPOR yang dijabat oleh Sekretaris pada masing masing SKPD dalam rangka evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik dan penanganan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR).
9. Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

*e) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Komunikasi telah terlaksana secara keseluruhan pada satu buah program, yaitu program pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.158.421.719,- dari pagu program Rp 3.525.009.634,- dengan persentase capaian 89,60 %, terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 366.587.915,-.

*f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Komunikasi tahun 2023 sebanyak 3 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Komunikasi yang tugasnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional (Plt), 2 orang penanggungjawab kegiatan. Selain itu juga didukung oleh 9 orang tenaga kontrak (PTT) yang terdiri dari 3 orang jurnalis, 5 tenaga penyiar dan 1 orang tenaga administrasi. Keberhasilan capaian program pada Bidang Komunikasi didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Pengelolaan Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah dikelola cukup baik oleh sebagian besar perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Pengelolaan website e-Lapor (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang sudah cukup baik oleh tim Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Melakukan kerjasama dengan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, instansi vertikal Pemerintah maupun Tokoh Masyarakat sebagai narasumber untuk mengisi program forum konsultasi publik melalui siaran radio.
- Peningkatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.

- Peningkatan SDM pada bidang komunikasi dalam pengelolaan informasi melalui media sosial dan media online lainnya.
- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di bidang Komunikasi yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.
- Meningkatkan kapasitas-kapasitas personil lapangan dalam melakukan peliputan lapangan.

*g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Bidang Komunikasi dengan program pengelolaan komunikasi dan informasi publik disusun dengan target penggunaan anggaran pada triwulan I 46%, Triwulan II 7%, triwulan III 1% dan triwulan IV 46%.
- Rencana aksi kinerja pada Bidang Komunikasi dengan target kinerja persentase informasi yang disebarakan disusun berdasarkan ketersediaan anggaran yakni triwulan I 40%, Triwulan II 10%, triwulan III 10% dan triwulan IV 40%.

*h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Bidang Komunikasi, diantaranya:

- Kurangnya tenaga jurnalis dalam melakukan peliputan di lapangan.
- Kurangnya SDM admin pengelola informasi di SKPD sehingga pengelolaan informasi melalui PPID belum maksimal.
- Masih belum maksimalnya fungsi PPID dan PPID Pembantu dalam pelayanan informasi dan komunikasi publik.
- Penggunaan layanan LAPOR oleh masyarakat masih belum banyak yang mengetahui.
- Belum tersedianya anggaran khusus untuk operasional Kelompok Informasi Masyarakat dalam menjalankan kegiatan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personel teknis jurnalis dan tenaga teknologi informatika pada bidang komunikasi.
- Melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM dalam pengelolaan Infomasi publik.
- Menyajikan data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui website:  
1. <http://ppid.tanahlautkab.go.id>  
2. <http://portal.tanahlautkab.go.id>
- Melakukan Sosialisasi LAPOR kepada masyarakat melalui kegiatan manunggal Tuntung Pandang, siaran radio, Media Sosial dan pemberdayaan KIM.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas PMD untuk menyampaikan materi terkait penggunaan APBDes untuk operasional Kelompok Informasi Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kab. Tanah Laut.

#### 4.2 Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

Tabel 3.16 Hasil capaian realisasi sasaran Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	3.1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9 %	8,9%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%	100%	100%
3	2.1 Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%		

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TAHUN 2022		
		2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	17,8%	22,5%	10%	8,9%	8,9%	100%
2.	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rata-rata Capaian					100%

a) *Perbandingan Realisasi dengan Target*

Rata-rata Capaian Kinerja bidang penyelenggaraan *e-government* telah terealisasi 100%. Pada indikator kinerja persentase SKPD yang menerapkan SPBE hanya tercapai 8,9% dari target tahun 2023 sebesar 8,9% sehingga persentase capaiannya menjadi 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk indikator persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id dengan target 100% telah tercapai 100%, dan pada indikator kinerja persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi juga telah tercapai 100% dengan target 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka nilai persentase SKPD yang menerapkan SPBE yang telah tercapai 100%, yang merupakan akumulasi persentase capaian target kinerja dari kondisi awal Renstra sampai dengan capaian tahun 2023. Meskipun target telah tercapai 100% sesuai renstra namun kebutuhan akan teknologi dapat terus meningkat sesuai perkembangan yang semakin canggih dan modern sehingga kinerja dari bidang penyelenggaraan *e-government* harus dapat menyesuaikan. Sedang pada indikator

persentase penggunaan domain tanahloutkab.go.id dan persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi telah tercapai 100% sesuai dengan target akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sehingga kedepannya harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih baik.

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2023, 2022 dan 2021 yang terdiri dari indikator persentase SKPD yang menerapkan SPBE telah tercapai 9,8% pada tahun 2023, tercapai 10% pada tahun 2022 sedangkan capaian pada tahun 2021 tercapai 22,5%, terjadi penurunan capaian yang sebesar 1,1% dibandingkan realisasi tahun 2022, hal ini disebabkan adanya penyesuaian target kinerja pada tahun 2022 yang hanya ditargetkan 8,9% sesuai dengan target tahunan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan pada indikator Persentase penggunaan domain tanahloutkab.go.id telah terealisasi 100% dengan target 100% sehingga tercapai 100% seperti halnya pada tahun 2022. Pada indikator kinerja Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi telah tercapai 100% dengan target 100% pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 juga telah tercapai 100%.

*c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**- Persentase SKPD yang menerapkan SPBE**

Persentase SKPD yang menerapkan SPBE yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 telah tercapai 8,9%, sedang pada tahun 2022 telah tercapai 10% dari target 8,9% dengan persentase capaian 112,36% dibandingkan tahun 2021 yang tercapai 22,5 % dari target 50% dengan persentase capaian 45% dari target yang ada.

Data tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah SKPD yang menerapkan e-government sebanyak 4 SKPD dibagi jumlah SKPD yang ada (berjumlah 45), sehingga diperoleh persentase capaian 8,9%. Pencapaian ini merupakan hasil kerjasama Bidang Penyelenggaraan E-Government dengan empat SKPD dalam penerapan SPBE dalam pelayanannya yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, serta Kelurahan Pelaihari.

Penerapan SPBE mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2018 sehingga hasil yang diperoleh pada tahun tersebut masih belum maksimal. Pada tahun 2019 dan 2020 mulai meningkat, hingga di tahun 2021 sampai 2023 ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah bertahan dalam predikat baik atas penyelenggaraan SPBE. Proses pencapaian tersebut didukung dengan baik oleh Kepala Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut, sehingga SKPD dapat meningkatkan pemahaman tentang perlunya Penerapan SPBE. Keberhasilan capaian ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dari seluruh instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut guna menyukseskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah guna menghadapi era digital yang terus berkembang. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah penataan infrastruktur TIK dan belum terhubungnya jaringan antar SKPD untuk 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPBE tersebut dalam bentuk konsultasi/koordinasi, fasilitasi dan juga pemberian rekomendasi pembuatan jaringan dan perangkat yang diperlukan oleh SKPD

dalam penerapan SPBE. Untuk kedepannya perlu diadakan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang SPBE tersebut serta melakukan koordinasi secara langsung terkait tindak lanjut yang harus dipenuhi dalam indikator SPBE.

- **Persentase Penggunaan Domain tanahlautkab.go.id**

Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 telah tercapai 100% dari target 100% dengan persentase capaian 100% dibandingkan tahun 2022 yang juga telah tercapai 100 % dari target 100% dengan persentase capaian 100%.

- **Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi**

Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 telah mencapai 100% dari target yang ada. Persentase capaian dihitung dari jumlah SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dibagi jumlah permohonan SKPD dikali 100%. Ada dua puluh delapan SKPD yang memohon fasilitasi dan dari semua permohonan tersebut telah diproses sesuai permohonan seperti tabel berikut:

Tabel 3.18 Daftar SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi tahun 2023

No	NAMA APLIKASI	SKPD PEMOHON	ALAMAT WEBSITE	KETERANGAN APLIKASI	JENIS LAYANAN
1	KIJANGMAS	DPUPR	<a href="https://isdn.tanahlautkab.go.id/">https://isdn.tanahlautkab.go.id/</a>	Program Kijangmas Tanah Laut (Integrated Services of the District Court and National Land Agency)	Layanan hosting domain
2	SIM-PKB	BPKAD	<a href="https://simpkb.bpkad.tanahlautkab.go.id/">https://simpkb.bpkad.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem Informasi Manajemen Pajak Kendaraan Bermotor	Layanan hosting sub domain

3	SILAPORORMAS	KESBANGPOL	<a href="https://silaporormas.tanahlautkab.go.id">https://silaporormas.tanahlautkab.go.id</a>	Sistem Informasi Laporan Organisasi Kemasyarakatan	Layanan hosting domain
4	SIPEMERHATI	KESBANGPOL	<a href="https://sipemerhati.tanahlautkab.go.id/">https://sipemerhati.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem Informasi Penyampaian Hasil Penelitian	Layanan hosting domain
5	MCD	INSPEKTORAT	<a href="http://mcd.tanahlautkab.go.id/">http://mcd.tanahlautkab.go.id/</a>	Monitoring Cakap Desa Cegah Korupsi di Pemerintahan Desa sejak Awal dengan Monitoring Cakap Desa	Layanan hosting domain
6	SIBAPER	BPKAD	<a href="https://persediaan.tanahlautkab.go.id/welcome">https://persediaan.tanahlautkab.go.id/welcome</a>	Pengelolaan Barang Persediaan	Layanan hosting domain
7	SIAPUSKES	DINKES	<a href="http://siapuskes.tanahlautkab.go.id">http://siapuskes.tanahlautkab.go.id</a>	Sistem Informasi Presensi Puskesmas yang di adopsi dari Siap Kabupaten Tanah Laut	Layanan hosting domain
8	E-SGIN	DISKOMINFO	<a href="http://e-sign.tanahlautkab.go.id/">http://e-sign.tanahlautkab.go.id/</a>	Aplikasi eSign untuk penerapan tanda tangan elektronik berbasis cloud	Layanan hosting domain
9	SI-SELIN	DISPUSIP	<a href="https://si-selin.tanahlautkab.go.id">https://si-selin.tanahlautkab.go.id</a>	Sistem Informasi indicator kinerja dinas perpustakaan	Layanan hosting domain
10	SI-EVI	DISPUSIP	<a href="https://si-evi.tanahlautkab.go.id/login">https://si-evi.tanahlautkab.go.id/login</a>	Sistem Informasi Evaluasi Perjalanan Dinas	Layanan hosting domain
11	SIDAPURDESA	INSPEKTORAT	<a href="http://sidapurdesa.tanahlautkab.go.id/login">http://sidapurdesa.tanahlautkab.go.id/login</a>	Sistem Informasi Koordinasi Pembinaan Aparatur Desa	Layanan hosting domain
12	SIPAPIP	INSPEKTORAT	<a href="http://sipapip.tanahlautkab.go.id/">http://sipapip.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem Informasi Apip	Layanan hosting domain
13	SIMANJABAPER	SETDA BAGIAN UMUM	<a href="http://simanjabaper.tanahlautkab.go.id/">http://simanjabaper.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem Informasi Persediaan dan Permohonan Barang pada Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut	Layanan hosting domain
14	SEDAP	UPT LAB DPUPRP	<a href="https://uptlablh.tanahlautkab.go.id/">https://uptlablh.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem Pencatatan dan Penyimpanan Data Sampel Kualitas Lingkungan	Layanan hosting domain
15	SIDADU	DISDIKBUD	<a href="https://sidadu.tanahlautkab.go.id/">https://sidadu.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem Informasi Data Terpadu	Layanan hosting domain
16	SITAMPAN	DISDIKBUD	<a href="https://sitampan.tanahlautkab.go.id/">https://sitampan.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem informasi Rekapitulasi absen tunjangan daerah	Layanan hosting domain
17	SIMISTIK	DINKES	<a href="https://simistik.tanahlautkab.go.id/">https://simistik.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem Informasi Manajemen Logistik	Layanan hosting domain
18	E-AGENDA	SETDA BAGIAN PROKOPIM	<a href="https://eagenda.tanahlautkab.go.id/">https://eagenda.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem Informasi Agenda Kepala Daerah	Layanan hosting domain
19	SITUBANG	DPMP TSP	<a href="http://situbang.dpmp.tsp.tanahlautkab.go.id/">http://situbang.dpmp.tsp.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem Informasi Gedung/Bangunan	Layanan hosting sub domain

20	SI-LKEU	BPKAD	<a href="https://silkeu.bpkad.tanahlautkab.go.id/author">https://silkeu.bpkad.tanahlautkab.go.id/author</a>	Sistem Informasi Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Layanan hosting sub domain
21	SIFINDA	BPKAD	<a href="https://sifinda.bpkad.tanahlautkab.go.id/">https://sifinda.bpkad.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem informasi Inventarisasi data aset	Layanan hosting sub domain
22	SIPOINT	DPMPSTSP	<a href="http://sipoint.dpmpstp.tanahlautkab.go.id/">http://sipoint.dpmpstp.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem Informasi Potensi Investasi Tanah Laut	Layanan hosting sub domain
23	SITEMAN MESRA	DPMPSTSP	<a href="https://sitemanmesra.dpmpstp.tanahlautkab.go.id/auth">https://sitemanmesra.dpmpstp.tanahlautkab.go.id/auth</a>	Sistem Penataan Dokumen dan Persuratan	Layanan hosting sub domain
24	E-KASDA	BPKAD	<a href="http://e-kasda.bpkad.tanahlautkab.go.id/login">http://e-kasda.bpkad.tanahlautkab.go.id/login</a>	Sistem penyediaan data dan informasi kas daerah Kabupaten Tanah Laut	Layanan hosting sub domain
25	SIPITA	DISKOMINFO	<a href="https://sipita.diskominfo.tanahlautkab.go.id/">https://sipita.diskominfo.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem informasi direktori kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan hosting sub domain
26	SIID BAPPEDA	BAPPEDA	<a href="https://siid.bappeda.tanahlautkab.go.id/author">https://siid.bappeda.tanahlautkab.go.id/author</a>	Sistem Informasi Inovasi Daerah	Layanan hosting sub domain
27	SI PUBA	KEC. BATU AMPAR	<a href="https://sipuba.kecbatuampar.tanahlautkab.go.id/">https://sipuba.kecbatuampar.tanahlautkab.go.id/</a>	Sistem Informasi Pendataan Umum pada Kecamatan Batu Ampar	Layanan hosting sub domain
28	SI ENAK	KEC. PELAIHARI	<a href="https://sienak.kecpelaihari.tanahlautkab.go.id/">https://sienak.kecpelaihari.tanahlautkab.go.id/</a>	Aplikasi Evaluasi Permohonan Hibah Kecamatan Pelaihari	Layanan hosting sub domain

Proses fasilitasi dilakukan melalui surat permohonan dari SKPD yang bersangkutan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian didisposisi oleh Kepala Dinas kepada Bidang Penyelenggaraan *E-Government* untuk diproses dan ditindaklanjuti. Strategi kedepannya ialah perlunya menyediakan layanan terpadu satu pintu pada setiap surat permohonan yang masuk kepada Dinas melalui online dan menyiapkan penjadwalan petugas informasi guna pelayanan *e-government* yang lebih baik.

#### d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Penyediaan layanan internet dan layanan data terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

2. Penyediaan layanan-layanan terkait teknologi dan informasi bagi seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diantaranya pengembangan aplikasi, jaringan, integrasi data, layanan *hosting*, *colocation server* dan digitalisasi.
3. Peningkatan peralatan penunjang kerja bagi aparatur guna pengoptimalan kinerja.
4. Kerjasama Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam peningkatan *e-government*.
5. Penyediaan perangkat *Command Center* Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pengelolaan jaringan fiber optik dan jaringan intra Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pembuatan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
8. Peningkatan SDM aparatur dengan mengadakan diklat intern urusan teknologi informasi.
9. Pengelolaan *Network Operation Center* (NOC) beserta fasilitas penunjangnya.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Penyelenggaraan E-Government hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program aplikasi informatika dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.120.343.560,- dari pagu program Rp 6.510.058.342,- dengan persentase capaian 94,01 %. Terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 389.714.782,-.

f) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Penyelenggaraan E-Government tahun 2022 sebanyak 5 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Penyelenggaraan E-Government, 2 orang penanggung jawab kegiatan dan 2 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 4 orang tenaga kontrak (PTT) yang terdiri dari 2 orang tenaga

pengelola aplikasi, 1 tenaga pengelola jaringan dan 1 orang tenaga administrasi. Keberhasilan capaian program pada Bidang Penyelenggaraan *e-government* didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaian kinerjanya, diantaranya:

- Pelaksanaan pemenuhan indikator penunjang penilaian SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang telah dikelola dengan cukup baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- Dukungan langsung dari Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas dalam memberikan arahan dan masukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Tanah Laut.
- Peningkatan SDM pada bidang Penyelenggaraan *E-Government* dalam pengelolaan sistem jaringan dan aplikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Kerjasama yang baik dari Tim Pengembangan Teknologi Informasi dan SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan *e-government*.
- Pemeliharaan infrastruktur dan jaringan yang selalu dimonitor secara berkala.
- Pembuatan dokumen arsitektur SPBE Kabupaten Tanah Laut.

Gambar dokumen arsitektur SPBE Kabupaten Tanah Laut  
yang disusun pada tahun 2023



*g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada bidang Penyelenggaraan E-Government pada program Aplikasi Informatika sebagian besar disusun pada triwulan I 92% dan triwulan IV 8%.
- Rencana aksi kinerja pada bidang Penyelenggaraan E-Government pada program Aplikasi Informatika dengan target kinerja Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagian besar dilaksanakan

pada pada Triwulan I 90% dan triwulan IV 10% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

#### *h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Bidang Penyelenggaraan *E-Government*, diantaranya:

- Kurangnya tenaga teknis yang mumpuni dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi serta aplikasi pada *Network Operation Center* (NOC) Kabupaten Tanah Laut.
- SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan infrastruktur dan teknologi serta aplikasi.
- Masih belum adanya tower induk jaringan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- belum adanya dana untuk pengisian ruang Command Center, sehingga command center belum dapat difungsikan.
- Adanya kondisi blankspot internet di beberapa titik.
- Semakin banyaknya permintaan pembuatan aplikasi dan kurangnya tenaga ahli berkemampuan khusus pada bidang Penyelenggaraan *e-government*.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Peningkatan SDM kepegawaian melalui pelatihan atau diklat terkait pengelolaan Teknologi Informasi.
- Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang SPBE dan koordinasi secara langsung terkait tindak lanjut yang harus dipenuhi dalam indikator SPBE.
- Diskominfo akan mengalokasikan perencanaan jangka panjang terhadap pembuatan tower Menara telekomunikasi induk untuk mengcover area blankspot jaringan di beberapa wilayah dan desa se-Kabupaten Tanah Laut.
- Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terkait penyediaan layanan internet menggunakan jaringan lastmile.

- Merencanakan terlaksananya koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut dan berpotensi dapat membantu pembiayaan untuk pengisian perangkat Command Center.

### 4.3 Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Tabel 3.19 Hasil capaian realisasi sasaran Kepala Bidang Statistik dan Persandian Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik	20%	20%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas data sektoral daerah	Persentase statistik sektoral daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%		

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TAHUN 2023		
		2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik	2,4%	2,4%	22,5%	20%	20%	100%
2.	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	100%	100%	100%	100%
		Rata-rata Capaian					100%

*a) Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata Capaian Kinerja bidang Statistik dan Persandian telah terealisasi 100%. Dari 2 indikator kinerja, indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik telah tercapai 20% dengan target 20% tahun 2023 sehingga persentase capaiannya 100%, sedang pada tahun 2022 tercapai 22,5% dengan target 20% dengan persentase capaiannya 112,5%. Untuk indikator lainnya juga telah tercapai 100% dari target tahun 2023 (100%), sehingga persentase capaiannya 100%. Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik yang diperoleh tahun 2023 sebesar 20%, jika dibandingkan target akhir Renstra 100% maka indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik diakumulasikan dari capaian tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sehingga diperoleh capaian 49,7%, yang artinya ada terdapat selisih 50,3% dari target Renstra akhir. Karena memang dalam proses pemanfaatan tanda tangan elektronik ini dilakukan secara bertahap sehingga belum seluruh SKPD siap dalam hal tersebut. Namun, untuk ke depannya capaian kinerja ini harus ditingkatkan karena target akhir renstra masih belum tercapai 100%. Sedangkan pada persentase statistik sektoral tahun 2023 telah tercapai 100% sesuai dengan target akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 yang terdiri dari indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik telah tercapai 20% pada tahun 2023 dengan target 20% sehingga persentase capaiannya 100% sedangkan pada tahun 2022 persentase capaiannya 112,5%, dan tahun 2021 kegiatan ini hanya tercapai 2,4% dengan target 50% sehingga persentase capaiannya

hanya 4,8%. Untuk indikator Persentase statistik sektoral telah terealisasi 100% dengan target 100% sehingga tercapai 100% sesuai target.

*c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**- Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik**

Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 telah tercapai 20%, sedangkan tahun 2022 telah tercapai 22,5%, terjadi penurunan capaian sebesar 2,5% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun berkenaan target 20% telah tercapai. Sedang jika dibandingkan dengan tahun 2021 telah terjadi peningkatan capaian dari tahun 2021 yang hanya mencapai 2,4% dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Hal ini disebabkan pemanfaatan persandian baru dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga hasil yang diperoleh pada tahun tersebut masih belum maksimal sedang pada tahun 2020 terkait tanda tangan elektronik sudah dalam tahapan pengusulan ke Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Kemudian di tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah mengupayakan tanda tangan elektronik ini agar dapat diterapkan dan diujicobakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan dukungan dari Kepala Daerah serta kerja sama yang solid antar SKPD agar dapat tercapai dengan baik guna menyukseskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi persandian/keamanan informasi diterapkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen/informasi/data elektronik sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 telah dapat diintegrasikan ke beberapa

aplikasi daerah salah satunya e-kinerja. Pada tahun 2023 telah dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Balai Sertifikat elektronik (BSrE) BSSN atas pemanfaatan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah transformasi persandian yang semula hanya mengurus keamanan informasi rahasia (santel) menjadi kegiatan keamanan informasi secara keseluruhan belum tersosialisasikan dengan baik. Pengamanan informasi harus mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat, sehingga sumber daya yang ada dapat menyesuaikan dengan isu-isu teknologi terkini. Strategi kedepan ialah perlunya penambahan personil bidang keamanan informasi dan keamanan siber, maupun adanya pelatihan/bimbingan teknis/koordinasi tentang keamanan informasi dengan instansi-instansi terkait.

- **Persentase statistik sektoral daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian dalam pencapaian Persentase statistik sektoral daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 telah mencapai 100% dari target yang ada dengan persentase capaian 100%. Semua SKPD telah melakukan input indikator data pada aplikasi Satu Data Tanah Laut sehingga target telah tercapai 100 %. Pada tahun 2023 Aplikasi Satu Data telah dikembangkan/update sistem yang terintegrasi dengan e-walidata SIPD dalam rangka mendukung terwujudnya SATU DATA INDONESIA. Kendala dalam pelaksanaannya ialah setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data. Langkah kedepan perlu pengembangan aplikasi satu data Tanah Laut untuk menunjang kegiatan penyusunan buku ikhtisar statistik sektoral daerah yang

lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara berkala dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

*d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Bersama Bappeda Kabupaten Tanah Laut membentuk forum satu data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Focus Group Discussion (FGD) dalam pengelolaan data statistik.
3. Sosialisasi Satu Data Tanah Laut kepada seluruh SKPD di Lingkup Pemkab Tanah Laut.
4. Pemantauan keterisian data pada aplikasi Satu Data.
5. Pengembangan dan update aplikasi Satu Data Tanah Laut.
6. Koordinasi terkait program kegiatan bidang statistik dan persandian ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pencetakan Buku Ikhtisar Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut.
8. Berkoordinasi dengan kantor BPS Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun metadata.
9. Mengintegrasikan aplikasi satu data dengan e-walidata SIPD.

*e) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Statistik dan Persandian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan realisasi anggaran sebesar Rp 30.020.000,- dari pagu program Rp 32.276.510,- dengan persentase capaian 93,01% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.256.510,- sedangkan pada program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.185.000,- dari pagu program Rp 17.685.000,-

dengan persentase capaian 91,52 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.500.000,-.

f) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Statistik dan Persandian tahun 2023 sebanyak 3 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Statistik dan Persandian, 1 orang Kasi Pengelolaan Statistik, dan 1 orang Kasi Persandian, Keamanan Informasi dan telekomunikasi. Tenaga pendukung staf pelaksana dilaksanakan oleh 1 orang tenaga kontrak. Meskipun demikian, bidang Statistik dan Persandian masih dapat memperoleh pencapaian yang cukup baik. Keberhasilan capaian program pada Bidang Statistik dan Persandian didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Koordinasi intensif antar SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pengisian indikator statistik sektoral melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut.
- Tahap awal pengusulan pemanfaatan persandian dengan menggunakan tanda tangan elektronik ke Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
- Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Bappeda dan BPS Kabupaten Tanah Laut terkait upaya pembentukan tim Satu Data Tanah Laut dan pemanfaatan data statistik sektoral.

g) *Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada bidang Statistik dan Persandian pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral disusun pada Triwulan I 12%, triwulan II 52% dan triwulan III 36% sedangkan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi disusun pada Triwulan I 100%.

- Rencana aksi kinerja pada bidang Statistik dan Persandian pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan target kinerja Persentase Statistik sektoral daerah sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan I 10%, triwulan II 70% dan triwulan IV 20% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Sedangkan pada program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan target kinerja Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan I 100% sesuai dengan ketersediaan anggaran.

#### *h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Bidang Persandian dan Statistik, diantaranya:

- Kurangnya personil yang ada pada Bidang Statistik dan Persandian khususnya untuk jabatan fungsional Sandiman maupun operator Sandi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis persandian dan keamanan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- Belum tersedianya ruangan representatif untuk pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- Setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data.
- Masih belum lengkapnya Data Statistik Sektoral yang disajikan pada semua SKPD guna mendukung satu data tanah laut dan

satu data Indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan masih belum mengertinya Admin SKPD dalam penentuan Indikator-indikator di tiap SKPD.

- Modul aplikasi sistem tanda tangan elektronik (TTE) yang telah diujicobakan namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil teknis Persandian dan keamanan informasi pada bidang Statistik dan Persandian.
- Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan/bimbingan teknis/diklat terkait Persandian dan Keamanan Informasi.
- Melakukan sosialisasi tentang Persandian dan pentingnya keamanan informasi.
- Pemenuhan fasilitas penunjang pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- Peningkatan SDM admin setiap SKPD dalam pengelolaan data statistik sektoral daerah.
- Pengembangan aplikasi satu data Tanah Laut yang lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara berkala oleh produsen data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Melakukan pengumpulan data pada tiap SKPD dan memberikan pendampingan serta sosialisasi tentang penentuan indikator-indikator dan penginputan pada aplikasi satu data Tanah Laut guna mendukung percepatan tersajinya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut.
- Koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan pihak BSR E terkait teknis penerbitan dan pembaruan sertifikat elektronik dengan modul baru sehingga dapat diintegrasikan ke dalam beberapa aplikasi nasional maupun daerah.

## **5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)**

## 5.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTA SE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHAD AP TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan pemenuhan dokumen laporan reformasi birokrasi	Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi	65 berkas	65 berkas	100%	65 berkas	100%
		Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal	6 orang	6 orang	100%	10 orang	60%
		Jumlah laporan pengelolaan aset daerah	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	100%
		Jumlah laporan tematik pelaksanaan reformasi birokrasi	4 dokumen	4 dokumen	100 %	8 dokumen	50%
Rata-Rata Capaian					100 %		

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TAHUN 2023		
		2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi	67 berkas	65 berkas	99 berkas	65 berkas	65 berkas	100 %
2.	Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal	2 orang	0 orang	0 orang	6 orang	6 orang	100%
3.	Jumlah laporan pengelolaan aset daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %
4.	Jumlah laporan tematik pelaksanaan reformasi birokrasi	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %
		Rata-rata Capaian					100 %

a) *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2023 sebesar 100%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 4 indikator. Pada indikator jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi dengan target 65 berkas tercapai 65 berkas yang terdiri atas 39 berkas urusan umum dan 26 berkas urusan kepegawaian. Indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal dengan target 6 orang dengan hasil 6 dengan persentase capaian 100%. Indikator jumlah laporan pengelolaan aset daerah dengan target 2 laporan yaitu laporan pengelolaan belanja modal dan laporan pengelolaan barang habis pakai telah tercapai 100%. Indikator jumlah laporan tematik pelaksanaan reformasi birokrasi telah tercapai seluruh tematik pada 4 dokumen tematik perubahan Reformasi Birokrasi. Untuk indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal ini jika dibandingkan dengan Renstra akhir maka hanya diperoleh capaian 60% perhitungan akumulasi dari capaian target dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Sedangkan indikator lainnya telah tercapai sesuai dengan target akhir Renstra.

b) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi**

Indikator jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi dengan target 65 berkas realisasinya yaitu 65 berkas yang diperoleh dari urusan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan ASN yang dilayani secara tertib. Dalam rangka mengupayakan peningkatan layanan administrasi umum pada Dinas Kominfo maka dilaksanakan

penandatanganan komitmen integritas bersama.

Gambar Komitmen bersama dalam upaya peningkatan layanan administrasi umum pada Dinas Kominfo



- **Jumlah Jumlah Kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal**

Indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal dengan target 6 orang realisasinya yaitu 6 orang dengan persentase 100%. Kegiatan diklat tersebut diikuti oleh bidang teknis terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Tanah Laut.

- **Jumlah laporan pengelolaan aset daerah**

Terealisasi sebanyak 2 laporan dengan target 2 laporan, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Laporan pengelolaan belanja modal dinas dan laporan pengelolaan barang habis pakai yang dibuat per triwulan untuk direkap selama satu tahun. Keberhasilan ini dicapai dengan pelaksanaan pengelolaan aset-aset daerah dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan rencana anggaran kas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

- **Jumlah dokumen laporan tematik pelaksanaan reformasi birokrasi**

Pada tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 4 dokumen laporan tematik pelaksanaan reformasi birokrasi dengan target 4 dokumen sehingga persentasenya menjadi 100%. Pada Tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 8 per area dengan target 8 dokumen laporan dengan realisasi 100%. Adapun penjabaran 4 dokumen tematik pada pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut terdiri dari 1) Pengentasan kemiskinan; 2) Peningkatan investasi; 3) Digitalisasi administrasi pemerintahan; dan 4) Pengendalian investasi. Pelaksanaan Tematik Reformasi Birokrasi tahun 2023 diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang terfokus pada pencapaian *outcome* bagi daerah Kabupaten Tanah Laut.

*c) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum bagi Dinas.
2. Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian.
3. Melaksanakan pengelolaan data aset dan BMD pada dinas.
4. Melaksanakan pelayanan persuratan dinas.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas.

*d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Umum dan Kepegawaian telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.130.000,- dari pagu sub kegiatan

Rp 6.683.943,- dengan persentase capaian 91,71 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 553.943,-.

2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 85.465.400,- dari pagu sub kegiatan Rp 91.113.045,- dengan persentase capaian 93,80 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 5.647.645,-.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.881.300,- dari pagu sub kegiatan Rp 10.080.527,- dengan persentase capaian 88,10 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.199.227,-.
4. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.178.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 16.500.054,- dengan persentase capaian 91,99 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.322.054,-.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.080.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 3.600.000,- dengan persentase capaian 85,56 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 520.000,-.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.825.000,- dari pagu sub kegiatan

Rp 10.000.000,- dengan persentase capaian 98,25 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 175.000,-.

7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 303.166.353,- dari pagu sub kegiatan Rp 309.000.000,- dengan persentase capaian 98.11 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 5.833.647,-.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 164.333.274,- dari pagu sub kegiatan Rp 191.000.000,- dengan persentase capaian 86,04 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 26.666.726,-.
9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 557.855.760,- dari pagu sub kegiatan Rp 562.640.076,- dengan persentase capaian 99,15 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 4.784.316,-.
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 32.907.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 41.000.000,- dengan persentase capaian 80,26 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 8.093.000,-.
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 58.569.800,- dari pagu sub kegiatan Rp 72.000.000,- dengan persentase capaian 81,35 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 13.430.200,-.

12. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.450.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 16.450.000,- dengan persentase capaian 100 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 0,-.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2023 sebanyak 2 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan 1 orang dan 1 orang Pengelola Teknologi Informasi selaku staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 3 orang tenaga kontrak (PTT) pengadministrasi umum. Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kesadaran dan kedisiplinan para ASN dan Pegawai Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melengkapi dokumen administrasi umum dan kepegawaian.
- Mengupayakan perbaikan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih baik.

f) *Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagian besar dianggarkan pada Triwulan I 60% dan triwulan II 40%.
- Rencana aksi kinerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada kegiatan untuk operasional rutin kantor sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan I 60% dan triwulan II 40% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, diantaranya:

- Kurangnya personil untuk mengelola data administrasi umum dan kepegawian
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penunjang yang ada di sekretariat.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil baik PNS maupun tenaga kontrak.
- Pemanfaatan sistem informasi persuratan untuk memudahkan penataan surat-menyurat.
- Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana umum guna peningkatan kinerja dinas.
- Menyiapkan sarana-prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi pada dinas.

## 5.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
----	-------------------	---------------	--------	-----------	--------------------	----------------------	--

1.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Jumlah dokumen perencanaan dinas	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	100%
		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	100%
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100%
Rata-Rata Capaian					100 %		

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TAHUN 2023		
		2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Jumlah dokumen perencanaan dinas	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2.	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%
3.	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Rata-rata Capaian							100 %

a) *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 sebesar 100%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 3 indikator. Pada indikator jumlah dokumen perencanaan dinas dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen yang terdiri atas dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun Anggaran 2024; Indikator jumlah dokumen penganggaran yang tersusun dengan target 4 dokumen dengan hasil tercapai 4 dokumen yaitu dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja

Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2023. Indikator jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun dengan target 1 dokumen laporan yaitu dokumen laporan kinerja tahun 2022 yang disusun pada tahun 2023 sebanyak 1 dokumen sehingga tercapai 100%. Semua indikator kinerja pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka dapat dianggap telah tercapai sesuai dengan target akhir Renstra.

*b) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**i. Jumlah dokumen perencanaan dinas yang tersusun**

Terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan target 1 dokumen, yang berarti telah terealisasi 100%. Dokumen tersebut yaitu dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun 2024. Tersedianya dokumen perencanaan dinas sebagai bagian administrasi yang penting dalam pelaksanaan kegiatan.

Gambar Dokumen Rencana Kerja (Renja) Diskominfo tahun 2024 yang disusun pada tahun 2023



**ii. Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun**

Terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan target 4 dokumen, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Dokumen penganggaran dinas yaitu dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tahun berkenaan.

**iii. Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun**

Terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan target 1 dokumen yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Dokumen laporan kinerja tersebut merupakan laporan

kinerja tahun 2022 yang disusun pada tahun 2023 yang berisi capaian/realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan selama tahun 2022.

Gambar Dokumen Laporan Kinerja (Lapkin) Diskominfo tahun 2022 yang disusun pada tahun 2023



*c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

Pencapaian kinerja pada sub bagian perencanaan dan keuangan didukung oleh pelaksanaan kinerja:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD.
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD.
3. Melaksanakan penyediaan dan pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai serta jaminannya
4. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan penatausahaan keuangan SKPD.

*d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik dengan anggaran sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.000.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 2.000.000,- dengan persentase capaian 100 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 0,-.
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 900.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 8.520.000.000,- dengan persentase capaian 100 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 0,-.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp 3.229.887.314,- dari pagu sub kegiatan Rp 3.836.888.971,- dengan persentase capaian 84,18 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 607.001.657,-.
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 2.360.761,- dari pagu sub kegiatan Rp 3.500.000,- dengan persentase capaian 67,45 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.139.239,-.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan tahun 2023 sebanyak 4 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dan 3 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 2 orang tenaga kontrak (PTT) sebagai tenaga administrasi. Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Perencanaan dan Keuangan didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

1. Pengelolaan administrasi perencanaan yang dilakukan cukup baik oleh para PNS dan tenaga kontrak pada sub bagian perencanaan dan keuangan.
2. Terpenuhinya personil pengelola Penatausahaan Keuangan SKPD yang cukup mumpuni di bidangnya.
3. Kerja sama seluruh bidang dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja SKPD.

*f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada dianggarkan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan I 60%, Triwulan II 13%, dan Triwulan III 27%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Triwulan I 16% dan triwulan II 84%.
- Rencana aksi kinerja pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan I 70% dan Triwulan II 30% menyesuaikan anggaran kegiatan.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada sub bagian perencanaan dan keuangan, diantaranya:

- Terlalu banyaknya tugas-tugas pada sub bagian perencanaan dan keuangan sehingga mengakibatkan seringnya terjadi keterlambatan atas beberapa laporan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan penataan dan pembagian tugas-tugas dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan.

### 5.3 Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan telekomunikasi

Tabel 3.25 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	8 SKPD	8 SKPD	100 %	10 SKPD	80%
		Jumlah aplikasi sistem ( <i>web service API</i> ) tandatangan digital terpusat	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	100%
Rata-Rata Capaian					100%		

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.26 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TAHUN 2023		
		2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	-	1 SKPD	10 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	100 %

2.	Jumlah aplikasi sistem (web service API) tandatangan digital terpusat	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
		Rata-rata Capaian					100 %

a) *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian Kepala Seksi Persandian tahun 2023 telah tercapai sesuai target 100%. Terdiri dari 2 indikator, yaitu indikator Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dengan target 8 SKPD dengan realisasi capaian 8 SKPD sehingga persentase capaiannya 100%, sedang indikator Jumlah aplikasi sistem (*web service API*) tandatangan digital terpusat dengan target 1 Aplikasi telah tercapai 100% (1 aplikasi). Kedua indikator ini jika dibandingkan dengan target capaian akhir Renstra maka pada indikator pertama hanya tercapai 80% sedangkan indikator kedua telah tercapai 100% sesuai dengan target Renstra.

b) *Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan pencapaian target tahun 2023 dengan tahun 2022 dengan terdiri dari 2 indikator, yaitu indikator Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi pada tahun 2023 telah dilakukan pada 8 SKPD sedangkan pada tahun 2022 telah dilakukan pada 10 SKPD. Namun pada tahun 2022 adanya perubahan modul dan pergantian beberapa pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sehingga perlu pembaharuan sistem tanda tangan elektronik. Ditambah lagi disebabkan belum adanya persiapan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarannya sehingga perlu dilakukan secara bertahap; pada indikator kedua yaitu Jumlah aplikasi sistem (*web service API*) tandatangan digital terpusat dengan target 1 Aplikasi telah tercapai 100%, indikator ini telah dapat dilaksanakan sejak tahun 2021 kemudian dilakukan

penyesuaian modul untuk diupdate sistem pada tahun 2023. Secara teknis perlu kesiapan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan kesiapan sistem sendiri yang harus diujicobakan setelah dibangun.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan perubahan indikator atas penyesuaian sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 di mana indikator sebelumnya yaitu jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi, dilakukan penyesuaian menjadi Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi. Pada tahun 2023 pada indikator tersebut telah tercapai 8 SKPD yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, sedangkan pada tahun 2022 telah tercapai 9 SKPD (22,5%) namun dengan indikator sebelum penyesuaian.

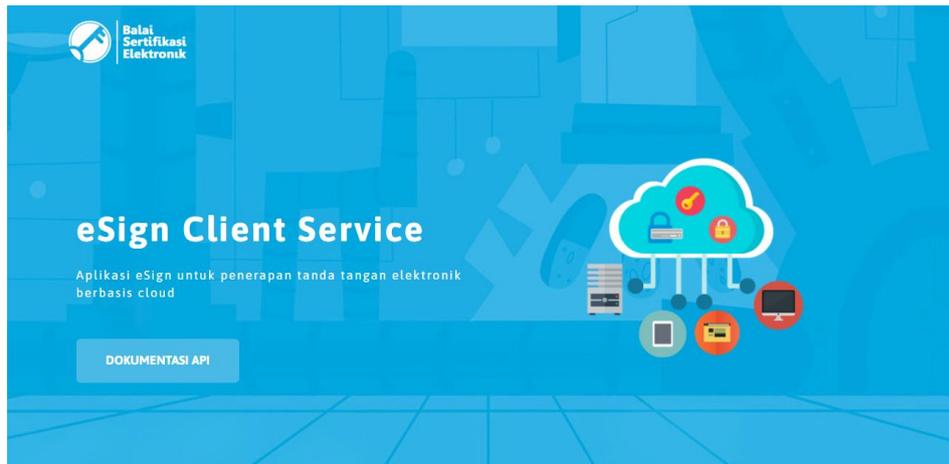
Gambar Sosialisasi pentingnya pengamanan informasi di Lingkup  
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut



- **Jumlah aplikasi sistem (web service API) tanda tangan digital terpusat**

Terealisasi sebanyak 1 aplikasi dengan target 1 aplikasi, yang berarti realisasi telah tercapai 100%. Tahun 2023 ini Modul aplikasi sistem tanda tangan elektronik (TTE) yang telah dibangun yang dapat dimanfaatkan ke beberapa aplikasi lainnya menggunakan layanan web service. selain itu dari BSrE juga menyediakan modul untuk integrasi sistem. Hal ini berarti agar bisa terus dimanfaatkan, maka sistem yang ada harus diubah/diperbarui baik secara arsitektur maupun proses dengan mengintegrasikan modul TTE dari BSrE BSSN.

Gambar tampilan Sistem Tanda tangan Elektronik yang telah dibangun/diupdate tahun 2023



Gambar Screenshot saat kegiatan uji kesesuaian dengan BSrE secara Online pada aplikasi TNDE



#### d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Melaksanakan inventarisasi seluruh SKPD untuk diusulkan kembali terkait penggunaan tanda tangan elektronik ke BSSN.
2. Melaksanakan peningkatan kemampuan personil yang ada dalam memahami tentang persandian dan keamanan informasi.
3. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang pentingnya keamanan informasi.

#### d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pada Seksi Persandian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.185.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 17.685.000,- dengan persentase capaian 91,52 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.500.000,-.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi tahun 2023 hanya ada 1 orang PNS yaitu Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi, tanpa ada dukungan tenaga kontrak. Analisis terkait capaian kegiatan pada Seksi Persandian dapat dikatakan sangat minim mengingat minimnya anggaran yang ada pada seksi persandian namun tahun 2023 telah diupayakan beberapa hal diantaranya:

- Minimnya tenaga personil yang ada pada seksi Persandian sehingga hanya dapat melaksanakan tahap awal pengusulan pemanfaatan persandian dengan menggunakan tanda tangan elektronik ke Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
- Melaksanakan peningkatan SDM pada seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi dengan mengikuti kegiatan pelatihan maupun bimtek secara virtual.

f) *Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan pada Triwulan I 100%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Triwulan I 80% dan Triwulan II 20% menyesuaikan ketersediaan anggaran.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya:

1. Kurangnya personil yang ada pada Seksi Persandian khususnya untuk jabatan fungsional Sandiman maupun operator Sandi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis persandian dan keamanan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
4. Belum tersedianya ruangan representatif untuk pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
5. Adanya perubahan Sistem dari BSrE BSSN sehingga sistem yang ada harus diubah/diperbarui baik secara

arsitektur maupun proses dengan mengintegrasikan modul TTE BSR E BSSN.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Melakukan pengusulan penambahan personil teknis Persandian dan keamanan informasi pada bidang Statistik dan Persandian.
2. Peningkatan SDM pegawaiian melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait Persandian dan Keamanan Informasi.
3. Melakukan sosialisasi tentang Persandian dan pentingnya keamanan informasi.
4. Pemenuhan fasilitas penunjang pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
5. Koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan pihak BSR E terkait teknis penerbitan dan pembaruan sertifikat elektronik dengan modul baru.
6. Asistensi penerapan modul TTE BSR E untuk integrasi ke sistem yang sudah ada
7. Mempersiapkan server *development/production* untuk uji coba penerapan sistem yang sudah diperbarui.

#### 5.4 Kepala Seksi Pengelolaan Statistik

Tabel 3.27 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENT ASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengisian indikator pada aplikasi Satu Data Tanah Laut	Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %	1 aplikasi	100%
		Jumlah cetak dokumen Statistik Sektoral daerah	1 buku	1 buku	100%	1 buku	100%
		Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut	40 orang	40 orang	100 %	40 orang	100%

Rata-Rata Capaian	100 %		
-------------------	-------	--	--

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.28 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TAHUN 2023		
		2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %
2.	Jumlah cetak dokumen Statistik Sektoral daerah	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%
3.	Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut	-	20 orang	20 orang	40 orang	40 orang	100%
		Rata-rata Capaian					100 %

*a) Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian Kepala Seksi Pengelolaan Statistik tahun 2023 telah tercapai 100%. Terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai dengan target 1 aplikasi tercapai 100% (1 aplikasi), indikator Jumlah buku cetak dokumen Statistik Sektoral daerah dengan target 1 buku tercapai 100% (1 buku), dan indikator Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut telah tercapai 100% (40 orang).

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan pencapaian target tahun 2023 dengan tahun 2022 terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator jumlah Aplikasi Satu Data yang memadai telah tercapai 1 aplikasi pada tahun 2023 dan di tahun 2022 juga tercapai 1 aplikasi; pada indikator

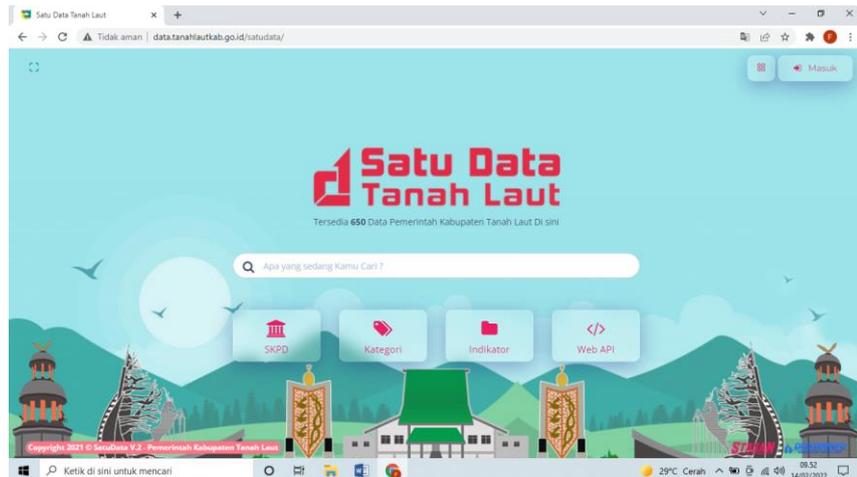
jumlah cetak dokumen statistik sektoral daerah pada tahun 2023 telah tercapai 1 buku dan tahun 2022 juga tercapai 1 buku; pada indikator ketiga yaitu jumlah admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian Indikator/Elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut telah tercapai 40 orang sesuai dengan target 40 orang pada tahun 2023 sedangkan di tahun 2022 dengan target 20 orang telah tercapai 20 orang dengan persentase capaian 100%. Secara keseluruhan persentase capaian tahun 2023 adalah 100%, namun akan tetap dilakukan penyesuaian dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dalam penentuan Indikator-indikator di tiap SKPD dalam rangka terwujudnya satu data indonesia. Seluruh indikator pada Seksi Pengelolaan Statistik telah tercapai sesuai target akhir Renstra.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai**

Terealisasi sebanyak 1 aplikasi dengan target 1 aplikasi, yang berarti telah terealisasi 100%. Tersedianya aplikasi Satu Data yang memadai bertujuan agar data yang tersedia dapat akurat dan dipertanggungjawabkan. Beberapa data dari beberapa SKPD dikumpulkan ke dalam satu sistem aplikasi yaitu aplikasi Satu Data yang diinputkan langsung oleh masing-masing admin SKPD sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan data yang mendasar. Kedepannya Aplikasi Satu Data masih harus dikembangkan seiring berkembangnya kebutuhan-kebutuhan data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2023 Aplikasi Satu Data Tanah Laut telah terintegrasi dengan Aplikasi e-walidata SIPD.

Gambar tampilan aplikasi Satu Data Tanah Laut *Update* fitur aplikasi pada tahun 2023



- **Jumlah buku data statistik sektoral**

Terealisasi sebanyak 1 buku dengan target 1 buku, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Keberhasilan atas capaian ini merupakan usaha dari seluruh elemen terkait dalam usaha mengumpulkan dan meninputkan data ke dalam Aplikasi Satu Data Tanah Laut. Dari seluruh data yang terhimpun akan diidentifikasi dan diklasifikasikan secara sektoral oleh analis statistik dan Kepala Seksi Pengelolaan Statistik sesuai bimbingan Kepala Bidang Statistik dan Persandian serta arahan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian data tersebut disusun menjadi buku data statistik sektoral daerah Kabupaten Tanah Laut atau diberi nama ikhtisar statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut. Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah perlunya menambah wawasan bagi admin Satu Data Tanah Laut dalam pengelolaan data karena data dalam aplikasi perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi statistik yang bisa dipublikasikan sehingga perlu penyusunan buku-buku statistik yang lain. Perlunya pemanfaatan satu data dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Gambar Cetak Buku Ikhtisar Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut Data Pembangunan tahun 2022 yang disusun pada tahun 2023



- **Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut**

Pada tahun 2023 pada indikator ini telah terealisasi sebanyak 40 orang dengan target 40 orang yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Adapun 40 orang ini berasal dari seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan pengisian indikator isian/eleman aplikasi Satu Data Tanah Laut pada tahun 2023 merupakan tahapan ketiga sejak dilaksanakan pada tahun 2021 yang juga diikuti oleh 20 SKPD. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap disebabkan terbatasnya anggaran dan tenaga pada Seksi Pengelolaan Statistik. Namun meskipun demikian, dalam kegiatan ini seluruh admin SKPD telah bersungguh-sungguh mengikuti proses belajar dan menginput data ke dalam aplikasi Satu Data. Untuk ke depannya perlu menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan bagi seluruh admin Satu Data dalam pengisian indikator Satu Data.

o. *Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan sosialisasi Satu Data Tanah Laut ke SKPD di Lingkup Pemkab Tanah Laut.
2. Melaksanakan pemantauan keterisian data pada aplikasi Satu Data per bulan..
3. Melaksanakan pengembangan dan update aplikasi Satu Data Tanah Laut.
4. Melaksanakan koordinasi terkait program kegiatan bidang statistik dan persandian ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Melaksanakan pencetakan Buku Ikhtisar Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut.
6. Melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut dalam upaya penyusunan dokumen statistik sektoral daerah.

p. *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Statistik hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan realisasi anggaran sebesar Rp 30.020.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 32.276.510,- dengan persentase capaian 93,01 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.256.510,-.

q. *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Seksi Pengelolaan Statistik tahun 2023 sebanyak 1 orang PNS yang terdiri dari 1

orang Kepala Seksi Pengelolaan Statistik yang hanya dibantu oleh 1 orang tenaga kontrak (PTT) sebagai staf pelaksana. Keberhasilan capaian kegiatan pada Seksi Pengelolaan Statistik didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

1. Dalam penyusunan data statistik sektoral daerah menggunakan SDM admin seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam hal pengisian data statistik.
2. Proses pengolahan akhir buku statistik Sektoral dengan melibatkan tenaga kontrak pada internal Dinas Komunikasi dan Informatika serta tenaga dari pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut.
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh SKPD dalam hal pengisian data dan selaku produsen data yang bertanggung jawab atas data yang diisikan pada aplikasi Satu Data Tanah Laut.

r. *Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Pengelolaan Statistik pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dianggarkan pada Triwulan I 10%, Triwulan II 70% dan Triwulan IV 20%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Pengelolaan Statistik pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dilaksanakan pada Triwulan I 10%, Triwulan II 70% dan Triwulan IV 20%.

s. *Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Seksi Pengelolaan Statistik, diantaranya:

4. Hanya ada satu orang PTT sebagai personil/staf pelaksana pada Seksi Pengelolaan Statistik.
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis terkait pengelolaan statistik.
6. Setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data.
7. Belum Lengkapnya Data Statistik Sektorial yang Disajikan pada semua SKPD guna mendukung satu data tanah laut dan satu data indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Melakukan pengusulan penambahan personil/staf teknis ASN dalam pengelolaan statistik.
2. Peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait pengelolaan statistik.
3. Melakukan sosialisasi tentang petunjuk pengisian aplikasi Satu Data Tanah Laut.
4. Peningkatan SDM admin setiap SKPD dalam pengelolaan data statistik sektoral daerah.
5. Pengembangan aplikasi satu data Tanah Laut yang lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara berkala oleh produsen data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
6. Melakukan pengumpulan data pada tiap SKPD dan memberikan pendampingan serta sosialisasi tentang penentuan indikator-indikator dan penginputan pada

aplikasi satu data tanah laut guna mendukung percepatan tersajinya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut.

7. Bersama BPS Tanah Laut melakukan sosialisasi untuk pendampingan penyusunan metadata statistik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## B. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023

#### Ringkasan Realisasi APBD SKPD 2022 dan 2023

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Realisasi			%	Realisasi			%	Peningkatan /Penurunan (%)
		Pagu Tahun 2022	Pagu APBD-P Tahun 2022	Tahun 2022		Pagu Tahun 2023	Pagu APBD-P Tahun 2023	Tahun 2023		
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		
1	2	4		4	5					
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	555.056.000	555.056.000	562.424.000	101,33	562.424.000	562.424.000	571.265.600	101,57	0,24
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	555.056.000	555.056.000	562.424.000	101,33	562.424.000	562.424.000	571.265.600	101,57	0,24
	Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	555.056.000	555.056.000	562.424.000	101,33	562.424.000	562.424.000	571.265.600	101,57	0,24
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	10.349.826.905	10.474.476.919	9.517.772.688	90,87	14.298.548.208	15.282.604.284	13.845.191.241	90,59	-0,28
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10.247.326.905	10.216.094.879	9.298.654.938	91,02	10.928.319.168	11.758.965.841	10.646.943.427	90,54	-0,48
	- Belanja Pegawai	4.108.380.717	3.808.380.717	3.150.303.206	82,72	3.836.888.971	3.836.888.971	3.229.887.314	84,18	1,46
	- Belanja Barang dan Jasa	6.138.946.188	6.407.714.162	6.148.351.732	95,95	7.091.430.197	7.922.076.870	7.417.056.113	93,63	-2,32
2.2	<b>BELANJ MODAL</b>	102.500.000	258.382.040	219.117.750	84,80	3.370.229.040	3.523.638.443	3.198.247.814	90,77	5,97

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	133.682.040	110.062.750	82,33	2.701.497.725	2.838.870.756	2.570.263.314	90,54	8,21
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	8.181.810	24.218.182	23.231.000	95,92	95,92
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	102.500.000	124.700.000	109.055.000	87,45	165.500.000	165.500.000	129.840.000	78,45	-9
- Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0	495.049.505	495.049.505	474.913.500	95,93	95,93
<b>Jumlah</b>	<b>10.349.826.905</b>	<b>10.474.476.919</b>	<b>9.517.772.688</b>	<b>90,87</b>	<b>14.298.548.208</b>	<b>15.282.604.284</b>	<b>13.845.191.241</b>	<b>90,59</b>	<b>-0,28</b>

Gambaran tabel 3.26 tersebut di atas menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 2023 ada kenaikan 0,24 % dari tahun 2022, dan pendapatan pada tahun 2023 masih melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya tambahan pendapatan dari pembayaran retribusi daerah pengendalian menara telekomunikasi atas bangunan menara yang beroperasi pada tahun 2023. Pada pos belanja tahun ini realisasi penyerapan dananya sebesar Rp. 13.845.191.241,- (90,59%), ada penurunan sebesar 0,28 % dari belanja tahun 2022 sebesar Rp. 9.517.772.688,- (90,87%), hal ini menunjukkan meskipun ada penurunan nilai realisasi keuangan namun pencapaian kinerja fisik telah terlaksana seluruhnya di tahun 2023 dengan predikat sangat baik.

Tabel 3.30 : Realisasi APBD SKPD Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
		( Rp. )	( Rp. )	
1	2	4	4	5
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>562.424.000</b>	<b>571.265.600</b>	<b>8.841.600</b>
1.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>562.424.000</b>	<b>571.265.600</b>	<b>8.841.600</b>
	Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	562.424.000	571.265.600	8.841.600
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>15.282.604.284</b>	<b>13.845.191.241</b>	<b>1.437.413.043</b>
2.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.758.965.841</b>	<b>10.646.943.427</b>	<b>1.112.022.414</b>
	- Belanja Pegawai	3.836.888.971	3.229.887.314	607.001.657
	- Belanja Barang dan Jasa	7.922.076.870	7.417.056.113	505.020.757
2.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.523.638.443</b>	<b>3.198.247.814</b>	<b>325.390.629</b>
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.838.870.756	2.570.263.314	268.607.442
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.218.182	23.231.000	987.182
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.500.000	129.840.000	35.660.000
	- Belanja Modal Aset Tatap Lainnya	495.049.505	474.913.500	20136.005
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>15.282.604.284</b>	<b>13.845.191.241</b>	<b>1.437.413.043</b>

Dilihat dari pendapatan yang diperoleh dan realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 ini masih mengalami **SILPA** anggaran pembiayaan sebesar **Rp. 1.437.413.043,-** (*Satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu empat puluh tiga rupiah*).

## 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

- Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.31 Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

No.	Sasaran	Program	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
I	- Administrasi umum dan kepegawaian - Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	5.197.574.798	4.520.220.962	86,97 %
II	Penyebaran informasi dan komunikasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.525.009.634	3.158.421.719	89,60 %
III	Pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.510.058.342	6.120.343.560	94,01 %
IV	Kualitas data statistik sektoral SKPD	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	32.276.510	30.020.000	93,01 %
V	Pemanfaatan sandi (keamanan informasi)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	17.685.000	16.185.000	91,52 %
		<b>Jumlah</b>	<b>15.282.604.284</b>	<b>13.845.191.241</b>	<b>90,59 %</b>

### 3. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran Strategis tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	90,59%	99,48%	8,89%
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	94,01%	100%	5,99%
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	94,01%	100%	5,99%
4	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	94,01%	100%	5,99%
5	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarakan	89,60%	100%	10,4%
6	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	89,60%	100%	10,4%
7	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	91,52%	100%	8,48%
8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	86,97%	100%	13,03%
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi	86,97%	100%	13,03%
		Nilai SAKIP SKPD			
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	93,01%	100%	6,99%

### **3.1 Analisis Penggunaan Anggaran dan Penggunaan Sumber Daya Terhadap Pencapaian Kinerja**

Berdasarkan tabel Tabel 3.28 dan tabel 3.29 di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator dengan persentase 90,59%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran yang cukup tinggi, yaitu indikator persentase Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu dan indikator Nilai RB SKPD dan Nilai SAKIP SKPD dengan Tingkat efisiensi sebesar 13,03%. Hal ini terjadi karena pelaksanaan kegiatan atas pemenuhan tata kelola administrasi umum dan kepegawaian berjalan dengan lancar dan pelaksanaan implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah disusun.

Pencapaian realisasi ketiga indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan dari internal yaitu komitmen dari seluruh pegawai yang telah bekerja keras berupaya agar pencapaian target bisa terpenuhi 100% secara fisik kegiatan. Anggaran pelaksanaan kegiatan untuk pemenuhan pengelolaan umum dan kepegawaian serta pelaksanaan implementasi RB dan SAKIP Dinas telah terealisasi 86,97% sehingga pemerintah daerah memiliki SILPA dari kegiatan tersebut. Adapun SILPA tersebut sebagian besar berasal dari sub kegiatan penyediaan gaji pegawai, yang disebabkan adanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi Diskominfo selama 5 bulan serta belum terisinya formasi ASN PPPK yang telah disediakan sebanyak 2 orang di tahun 2023.

Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran seluruh indikator telah menunjukkan efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja. Artinya pada pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan

masing-masing indikator tersebut tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan hanya anggaran sisa yang tidak terserap yang merupakan efisiensi anggaran.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran hanya terdapat satu indikator yang dianggap kurang optimal yaitu indikator kinerja utama Diskominfo yaitu Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), di mana dari pencapaian kinerja tidak memenuhi target sebagaimana ditetapkan yaitu hanya 99,48% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran/keuangan mencapai 90,59% yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp. 13.845.191.241,- yang dialokasikan pada 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Dalam hal penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dari sisi kepegawaian memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai jumlah PNS sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan sumber daya manusia/susunan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 42 orang yang terdiri dari 19 orang PNS dan 23 orang Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang meliputi : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Komunikasi, Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government*, Kepala Bidang Statistik dan Pesandian, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kepala Seksi Pengelolaan Statistik, Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi, fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Muda 2 orang, staf pelaksana/fungsional umum 12 orang serta tenaga Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 23 orang. Masing-masing pegawai telah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan

tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Penggunaan sumber daya berupa sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2023 sudah mencukupi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun akan terus ditingkatkan guna peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik. Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai target indikator kinerja, antara lain:

10. Jaringan Intra antar SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
11. Akses Internet terpadu Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
12. Ruang *Network Operation Center* (NOC);
13. Gedung Command Center Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
14. Akses komunikasi dengan 1 unit tower pemancar radio;
15. Portal Website Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
16. Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
17. Studio LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut.
18. Aplikasi Layanan data statistik dan Layanan keamanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

#### 4. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.33 Tabel Realisasi APBD Tahun 2022 dan 2023

No	Tahun 2022				Tahun 2023			
	Program/Kegiatan (sub kegiatan)	Anggaran	Realisasi	%	Program/Kegiatan (sub kegiatan)	Anggaran	Realisasi	%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
1	<b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17.420.000</b>	<b>9.227.500</b>	<b>52,97</b>	<b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	2.900.000	2.900.000	100,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.900.000	5.525.000	62,08	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.520.000	3.702.500	43,46	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000	900.000	100
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.812.860.717</b>	<b>3.153.626.106</b>	<b>82,71</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.840.388.971	3.232.248.075	84,16
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.808.380.717	3.150.303.206	82,72	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.836.888.971	3.229.887.314	84,18
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.480.000	3.322.900	74,17	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.500.000	2.360.761	67,45
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>267.088.059</b>	<b>252.910.465</b>	<b>94,69</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	446.977.569	431.726.053	96,59
3.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.339.079	4.713.900	88,29	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.683.943	6.130.000	91,71

3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.939.516	27.165.600	75,67	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	91.113.045	85.465.400	93,80
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.080.527	8.881.300	88,10
3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.809.464	15.898.100	94,58	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.500.054	15.178.000	91,99
3.5	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000	13.000.000	100	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	9.825.000	98,25
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000	192.102.865	98,01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.000.000	303.166.353	98,11
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.218.182</b>	<b>23.231.000</b>	<b>95,92</b>
4.1	Pengadaan Mebel	-	-	-	Pengadaan Mebel	-	-	-
4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.218.182	23.231.000	95,92
4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>719.522.121</b>	<b>698.357.022</b>	<b>97,06</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>753.640.076</b>	<b>722.189.034</b>	<b>95,83</b>
<b>5.1</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.925.151	115.727.962	92,64	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.000.000	164.333.274	86,04
<b>5.2</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.596.970	582.629.060	97,99	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.640.076	557.855.760	99,15
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>184.074.891</b>	<b>178.321.600</b>	<b>96,87</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>129.450.000</b>	<b>107.926.800</b>	<b>83,37</b>
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.983.593	56.214.500	98,65	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000	32.907.000	80,26

6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.674.298	108.157.100	96,85	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000	58.569.800	81,35
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.417.000	13.950.000	90,48	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.450.000	16.450.000	100,00
6.4	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau	-	-	-	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			
<b>7</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.420.881.290</b>	<b>2.290.440.245</b>	<b>94,61</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.525.009.634</b>	<b>3.158.421.719</b>	<b>89,60</b>
7.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-
7.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	-	-	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100.021.919	91.526.250	91,51
7.3	Pengelolaan Media Komunikasi publik	2.096.250.150	1.980.310.000	94,47	Pengelolaan Media Komunikasi publik	2.983.994.515	2.634.854.500	88,30
7.4	Pelayanan Informasi Publik	324.631.140	310.130.245	95,53	Pelayanan Informasi Publik	440.993.200	432.040.969	97,97
7.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>				<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>			

<b>8</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.881.153.600</b>	<b>2.787.251.000</b>	<b>94,56</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.344.058.342</b>	<b>5.989.993.560</b>	<b>94,42</b>
8.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.881.153.600	2.787.251.000	96,74	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.344.058.342	5.989.993.560	94,42
<b>9</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>71.700.000</b>	<b>62.975.000</b>	<b>87,83</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>166.000.000</b>	<b>130.350.000</b>	<b>78,52</b>
9.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	71.700.000	62.975.000	87,83	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	166.000.000	130.350.000	78,52
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			
<b>10</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.805.090</b>	<b>47.370.000</b>	<b>95,11</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>32.276.510</b>	<b>30.020.000</b>	<b>93,01</b>
10.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	49.805.090	47.370.000	95,11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	32.276.510	30.020.000	93,01
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			
<b>11</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.805.090</b>	<b>47.370.000</b>	<b>95,11</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.685.000</b>	<b>16.185.000</b>	<b>91,52</b>
11.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.971.151	32.175.000	73,06	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.685.000	16.185.000	91,52
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.474.476.919</b>	<b>9.517.772.688</b>	<b>90,87</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>15.282.604.284</b>	<b>13.845.191.241</b>	<b>90,59</b>

Dari tabel perbandingan realisasi anggaran capaian Sasaran Strategis Tahun 2022 dengan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa belanja tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 10.474.476.919,- telah terealisasi sebesar Rp 9.517.772.688,- dengan persentase 90,87 % sedangkan pada tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp 15.282.604.284,- telah terealisasi sebesar Rp 13.845.191.241,- dengan persentase 90,59 %. Dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan realisasi sebesar 0,28 %. Meskipun demikian, pagu anggaran belanja yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2023, di mana tahun 2023 fokus kegiatan pada pencapaian akhir renstra dan RPJMD sehingga target akhir Renstra dapat dicapai sesuai dengan prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Koordinasi antar instansi belum cukup optimal dalam mendukung terlaksananya implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

4. Masih adanya beberapa wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur telekomunikasi atau akses internet, sehingga menghambat penggunaan layanan *e-government* di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu jika memungkinkan.
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan membentuk tim internal evaluasi mandiri SPBE dalam rangka pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut dengan menyusun jadwal kegiatan evaluasi mandiri.
4. Melakukan perencanaan jangka panjang terhadap pembuatan tower menara telekomunikasi induk untuk mengcover area blankspot jaringan di beberapa wilayah dan Desa se-Kabupaten Tanah Laut ataupun melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terkait penyediaan layanan internet menggunakan jaringan lastmile.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Dalam perseptif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, yang dalam hal ini juga berarti bahwa kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan **realisasi fisik 97,72%** dan **realisasi keuangan 90,59 %**, dengan kategori capaian realisasi fisik **sangat tinggi** dan realisasi keuangan **sangat tinggi**, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Kurangnya komitmen para *leader* untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan sebagainya serta penambahan personil tenaga pembantu.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Memberi dukungan kepada para *leader* untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Dokumen arsitektur SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang meliputi sebagai berikut:

### **1. Tanah Laut *Smart Government* dan *Smart City***

Tanah Laut *Smart Government* meliputi *smart* perencanaan, monitoring, evaluasi, pembangunan kapasitas, serta implemetasi kebijakan. Sedangkan *Smart City* memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Tanah Laut memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tanah Laut *Smart city* meliputi penyediaan layanan pemerintahan, *public safety*, kependudukan *online*, *security surveilane*, *smart* UKM (pengusaha kecil dan menengah), layanan *digital park* (perpustakaan digital, konten pendidikan *online*) dan lain sebagainya. Pelaksanaannya terbagi dalam dua tahapan yaitu pada pembangunan *Smart Government* dan Pembangunan fasilitas *Smart City*.

### **2. Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Yang Berbasis Data**

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan tahapan perencanaan dan pembangunan *data/command center* serta

jaringan fiber optik antar SKPD dan tower bersama sebagai infrastruktur penunjang dalam mendukung *Smart Government* dan *Smart City*.

### **3. Pelaksanaan dan Penerapan kaidah-kaidah SPBE.**

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 31 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan SPBE yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

### **4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.**

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

### **5. Pemanfaatan Layanan Keamanan Informasi**

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat perlu direspon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersikap responsif dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat rentan akan penyalahgunaan baik data maupun dokumen. Untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga

diperlukan adanya kebijakan terkait keamanan informasi di Lingkup  
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2024  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut



**GENTRY YULIANTONO, SE**  
NIP. 19660708 199303 1 002